

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
HUTANG-PIUTANG DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)  
KEC. KALORAN KAB. TEMANGGUNG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.I)  
Dalam Ilmu Syari'ah**



*Disusun Oleh :*

**MUHAMAD NAIM**

**2103097**

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2008**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah skripsi  
A.n. Muhamad Naim

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas  
Syari'ah  
IAIN Walisongo  
Di-Semarang**

*Assalamu'alaikum War. Wab.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya. Maka dengan ini saya kirimkan skripsi saudara :

Nama : Muhamad Naim  
NIM : 2103097  
Jurusan : Muamalah  
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
PELAKSANAAN HUTANG PIUTANG DI UNIT  
PENGELOLA KEGIATAN KEC. KALORAN  
KAB. TEMANGGUNG**

Dengan ini mohon kiranya skripsi saudara dapat segera untuk di munaqosyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum War. Wab.*

Semarang, 5 Mei 2008

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag  
NIP. 150 216 809

Nur fathoni, M.Ag.  
NIP. 150 299 490

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhamad Naim  
NIM. : 2103097  
Jurusan : Muamalah  
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
PELAKSANAAN HUTANG PIUTANG DI UNIT  
PENGELOLA KEGIATAN KEC. KALORAN KAB.  
TEMANGGUNG**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumluade / baik / cukup, pada: **tanggal 11 Juni 2008.**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Islam Strata 1 (S1) Tahun Akademik 2008/2009 guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah.

Semarang, 11 Juni 2008

**Ketua Sidang**

**Sekretaris**

**(Drs. H. Musahadi, M. Ag)**  
**NIP. 150 267 754**

**(Nur fathoni, M.Ag)**  
**NIP. 150 299 490**

**Penguji I**

**Penguji II**

**(Prof. DR. h. Muslih Shobir, MA)**  
**NIP. 500 282 92**

**(H. Abdul Ghofur, M. Ag)**  
**NIP. 150 279 723**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**(Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.)**  
**NIP. 150 216 809**

**(Nur fathoni, M.Ag..)**  
**NIP. 150 299 490**

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis Menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah Atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 15 Mei 2008  
Penulis

**Muhamad Naim**  
NIM. 2103097

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

﴿ال عمران ١٣٠﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. (Q.S. Ali-Imran : 130).*

## ABSTRAK

Dalam skripsi ini akan dibahas tentang analisis hukum Islam Terhadap Pelaksana Hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec.Kaloran Kab. Temanggung.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tambahan yang disebut sebesar 1,5% per bulan dan penerapan sistem Tanggung Renteng pada pelaksanaan hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan Kec. Kaloran Kab. Temanggung tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *Field Research*, yaitu penelitian lapangan. Jenis penelitian semacam ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang sistem hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan Kec.Kaloran yang berkaitan dengan adanya tambahan dan sistem Tanggung Renteng yang ada didalamnya.

Untuk itu permasalahan bunga (pengembalian 1,5%) dalam hal ini yang terjadi pada waktu pengembalian, apakah hal tersebut termasuk kategori riba atau bukan, beberapa pendapat mengatakan (riba) haram karena ada dalil nash tentang hal tersebut dan ada pula yang mengatakan boleh karena ada dasar saling tolong menolong ( ta'awun).

Menurut beberapa pendapat yang menyatakan tentang tambahan yang bagaimanakah yang diharamkan (riba). Menurut Muhammad Abduh (w. 1905) dan muridnya, Muhammad Rashid Ridha, ketika menjelaskan bentuk riba yang dilarang pada masa pra-Islam, mereka menegaskan bahwa riba pada masa pra-Islam dipraktekkan dalam bentuk tambahan pembayaran yang diminta dari pinjaman yang telah melewati batas tempo pembayaran, sehingga mengalami penangguhan yang menyebabkan meningkatnya pembayaran hutang tersebut.

Dalam Munas Ulama' di Bandar Lampung pada tahun 1992, Nahdlatul Ulama' menetapkan tiga aspirasi yang berkembang dikalangan ulama' mengenai hukum bunga : 1. Hukumnya haram berdasarkan *Qiyas* terhadap riba. 2. Hukumnya halal berdasarkan *al-maslahah*. 3. Subhat.

Quraisy Syihab (tokoh *mufasssir* Indonesia) setelah menganalisis banyak hal yang berkaitan dengan ayat-ayat riba menyimpulkan *illat* keharaman riba adalah *al-Dzulm* (aniaya). Menurutny yang diharamkan adalah bunga atau tambahan yang dipungut secara *dzulm* (penindasan dan pemerasan) tidak semua bunga.

Dan menurut Tarjih Muhamdiyah dalam muktamarnya di Sidoarjo 1989 menyatakan bahwa bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya, demikian juga sebaliknya, termasuk dalam kategori *Mutasyabihat*.

Menyikapi praktek hutang-piutang yang terjadi di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kaloran, jasa atau bunga pinjaman sebesar 1,5 % per bulan adalah sebagai sesuatu yang sah dan diperbolehkan menurut hukum. Yang mana dalam hal ini penggunaan bunga tersebut oleh UPK digunakan atau dialokasikan untuk penghapusan kredit yang macet untuk digulirkan bagi kelompok yang lain yang belum mendapat dana pinjaman tersebut, dan selain itu juga digunakan untuk kegiatan sosial yang bermanfaat untuk masyarakat atau nasabah. Di samping itu pemungutannya pun tidak secara *Dzulm* (aniaya atau penindasan), Dan sistem *Tanggung Renteng* yang dipakai Unit Pengelola Kegiatan Kec. Kaloran Kab. Temanggung dalam Istilah Fiqih disebut dengan *Dhaman* atau *kafalah*, dan dalam pelaksanaannya diperbolehkan menurut hukum karena sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun yang ada di dalam transaksi hutang-piutang tersebut. keberadaan UPK dirasa banyak memberikan *maslahah* bagi kelompok peminjam kususny masyarakat Kecamatan Kaloran.

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya dan juga sanjungan shalawat beserta salam atas Baginda Nabi Agung Muhammad Saw.

Karya Ilmiah ini akan penulis persembahkan Untuk :

- ❖ Almarhum Bapak yang saya sayangi selama masa hidupnya yang telah mengantarkan saya dan mendukung saya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi hingga sekarang ini, mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima disisi Allah SWT Amiin.
- ❖ Ibuku tercinta, yang senantiasa memberikan doa restunya dalam setiap langkahku. Ibu doa dan dukunganmu senantiasa kuharapkan selalu agar tercapai cita-citaku dan mendapat ridha dari Allah SWT
- ❖ Kakak-kakakku dan adikku Abdul Jamil yang ku sayangi, kalian adalah semangat hidupku.
- ❖ Kepada Rif'atul Munawarah yang ku sayangi yang selalu meluangkan waktu dalam menemaniku guna menyelesaikan penyusunan skripsi ini, saya ucapkan terimakasih banyak atas dukungannya.
- ❖ Kepada keluarga besar Abah Muchoyyar yang selalu memberi dukungan kepada saya selama dalam bangku perkuliahan hingga hingga akhir penyusunan skripsi.
- ❖ Untuk teman-temanku. Nasuka, Joker, Ruslan, Sofwan, Atik, Afina, Sofi, Lilik, Mas Ardi, kalian adalah sahabat baikku terimakasih atas segala bantuan dan dukungan kalian semua...

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah Swt yang telah melimpahkan Taufik dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga tetap kepada Nabi agung Muhammad Saw, serta sahabat dan keluarga Nya.

Setelah sekian banyak rintangan dan hambatan-hambatan yang penulis jumpai, namun Alhamdulillah dengan hidayah dan taufiq-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hutang-Piutang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Kaloran Kab. Temanggung". Untuk mengantar penulis sebagai standard dalam memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Skripsi ini tidak mungkin terwujud dihadapan pembaca sekalian tanpa kontribusi dan bantuan dari banyak pihak dan pada kesempatan ini dengan perasaan tulus penulis sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi dorongan dan bantuan nya dan semua nasehat, bimbingan yang bermanfaat bagi penulisan skripsi ini.

Pernyataan terimakasih yang sangat dalam penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Yang terhormat Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, serta sebagai pembimbing I yang telah menyetujui dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Nur Fathoni, M.Ag., selaku pembimbing II, yang juga telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan juga pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. segenap dosen di lingkungan fakultas Syari'ah yang senantiasa memberikan berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini



4. Bapak pimpinan dan karyawan perpustakaan Institut dan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memperkenankan penulis meminjam buku-buku sebagai bahan literatur dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibunda tercinta Hj. Parsi dan *Almarhum* ayahanda H. Suyadi yang telah memberi dukungan dan kepercayaan kepada saya dalam melanjutkan jenjang pendidikan hingga ke perguruan tinggi IAIN Walisongo Semarang, mudah-mudahan Allah selalu memberi karunia kepadanya dan membalas segala amal perbuatan mereka Amin..
6. Keluarga besar Prof. DR. H. M. Muchoyyar HS.MA., yang tidak bisa saya lupakan semua jasa-jasanya, yang selalu membimbing, mengarahkan, dan memberi dorongan baik moril maupun materiil dalam pendidikan kami hingga penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan Allah membalas dengan lebih segala amal dan perbuatan mereka semua Amin.
7. Semua teman-temanku Mas Ardi, Sofwan, Nasuka, Atik, Joker dan Ruslan dan yang lain, yang telah memberi semangat kepada saya selama penyusunan skripsi ini.

Dengan karya sederhana ini penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan penulis kendatipun penulis selalu memohon semoga skripsi ini dapat mengantarkan sampai kepada tujuan dan senantiasa ada guna, manfaat, dan faidahnya, Amin.

Semarang 15 Mei 2008

Penulis

**Muhamad Naim**

NIM. 2103097

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penulisan .....	8
D. Telaah pustaka .....	8
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	15
<b>BAB II KONSEP DASAR HUTANG-PIUTANG DALAM ISLAM</b>	
A. Pengertian Hutang-Piutang Dalam Islam .....	17
B. Dasar Hukum Hutang-Piutang .....	19
C. Rukun dan Syarat Hutang-Piutang .....	23
D. Riba dalam Hutang-piutang .....	25
E. Konsep Kafalah Dalam Hutang-piutang .....	34
F. Pendapat Ulama' Terhadap Pelaksanaan Hutang-Piutang Untuk Usaha .....	38
<b>BAB III SISTEM PELAKSANAAN HUTANG-PIUTANG DI UPK KEC. KALORAN KAB. TEMANGGUNG</b>	
A. Gambaran Umum Kecamatan Kaloran .....	44
1. Letak Geografis .....	44
2. Kondisi Demografi .....	45
B. Sekilas Profil Unit Pengelola Kegiatan (UPK) .....	49
C. Mekanisme Hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) .....	55

D. Sistem Pengelolaan Hutang-piutang di (UPK) .....	65
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PELAKSANAAN HUTANG-PIUTANG DI UPK KEC. KALORAN KAB. TEMANGGUNG</b>	
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan 1,5 % per bulan Dalam Pelaksanaan Hutang-Piutang di UPK Kec. Kaloran Kab. Temanggung .....	70
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hutang-piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng .....	77
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran-Saran .....	82
C. Penutup .....	83

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia diciptakan oleh Allah adalah sebagai makhluk sosial, sehingga di dalam kehidupannya sehari-hari perlu berhubungan dengan manusia lain, sehingga manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling menolong, tukar menukar kebutuhan dan keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, bercocok tanam atau perusahaan-perusahaan yang lain baik dalam kepentingan sendiri maupun dalam kemaslahatan umum.<sup>1</sup>

Seperti yang terjadi pada zaman sekarang ini, peran manusia sebagai makhluk sosial untuk saling membantu sangatlah di butuhkan, terutama di dalam masalah ekonomi, karena sejak jatuhnya perekonomian bangsa kita akibat dari krisis ekonomi, kehidupan masyarakat kita serba susah dan serba kekurangan di dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari semua ini juga disebabkan akibat dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan yang membuat naiknya semua harga-harga kebutuhan pokok masyarakat yang terlalu tinggi, sehingga di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya pun, kadang-kadang tidak dapat dicukupkan dengan harta benda yang telah dimilikinya, dan biasanya bagi seseorang yang merasa kebutuhan harta

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasyid, "*Fiqh Islam*," Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2002, hal.17

bendanya tidak tercukupi sedangkan kebutuhannya telah mendesak maka untuk mengatasi hal ini kadang seseorang sering berhutang kepada orang lain baik hutang itu berupa uang atau berupa barang yang akan di bayar gantinya pada waktu yang lain, sesuai dengan ketentuan yang menjadi persetujuan dua pihak yang bersangkutan.

Melihat keadaan sosial dan ekonomi masyarakat sekarang ini sebagai mana yang dijelaskan diatas, peran pemerintah sangat diharapkan masyarakat dalam membantu memulihkan stabilitas dalam bidang ekonomi dan swadaya masyarakat yang lain, maka untuk mengatasi hal ini pemerintah telah mencanangkan sebuah program guna membantu memulihkan, dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat, yang mana dalam pelaksanaannya telah dimulai dan di gerakkan di tingkat-tingkat kecamatan yang disebut dengan program pengembangan kecamatan (PPK), yang didalam pengelolaannya dijalankan oleh sebuah institusi lokal di tingkat kecamatan yang disebut juga dengan nama Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

UPK dibentuk untuk kepentingan operasional PPK, untuk menjamin proses pengelolaan kegiatan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, yang didalam kepengurusannya dipilih oleh masyarakat melalui perwakilannya di forum Musyawarah Antar Desa (MAD), yang kemudian ditetapkan dan disahkan dengan surat keputusan Camat atas nama Bupati, yang berfungsi untuk mengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)-PPK yang pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan indek Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek kegiatan sarana/prasarana, pendidikan, kesehatan,

dan dana bergulir UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dan SPP (Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan) yang dikelola dalam kegiatan pinjaman kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Ajaran syari'at Islam secara implisit telah menggariskan penyelesaian terhadap semua masalah kehidupan, dalam bidang hukum syari'ah juga mengatur dalam berbagai hukum yang diantaranya adalah hukum muamalah. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak Islam dengan hukum muamalahnya memperbolehkan hutang-piutang atau pinjam-meminjam dengan konsekwensi wajib mengembalikan. Utang-piutang adalah merupakan hal yang kadang-kadang diperlukan dalam hidup sehari-hari, maka Islam memberikan peraturan-peraturan tentang masalah ini, Islam menggembirakan orang yang mampu agar mau memberikan *pertolongan* kepada saudara-saudaranya yang memerlukan.<sup>3</sup>

Sebagaimana firman Allah SAW :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢)

Artinya : "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan .."(Al-Maidah ayat 2).<sup>4</sup>

Dengan menitik beratkan pada "*memberi pertolongan*" itu dapat difahamkan bahwa hutang-piutang menurut ajaran Islam tidak dibenarkan bersifat memberatkan atau menarik manfaat dari pihak yang berhutang karena

---

<sup>2</sup> Departemen Dalam Negeri "Tim koordinasi program pengembangan kecamatan" Jakarta ,2005 hal.1

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir M.A "*Hukum Islam Tentang Riba, Utang-piutang dan gadai*" Bandung : PT. Al-Ma'arif, cet-ke 2, 1983, hal.35

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, Semarang : CV Toha Putra, 1989, hal. 142

kaidah hukum Islam menetapkan " setiap pinjaman yang memungut tambahan adalah riba"<sup>5</sup>, bahkan dalam ajaran Islam berkecenderungan untuk memberi kelonggaran-kelonggaran apabila yang berhutang benar-benar tidak mampu,

Manusia pada satu waktu tertentu pasti akan mengalami kondisi pasang surut perekonomian. Untuk menjembatani hal ini maka syari'at Islam memberikan aturan yang amat simpatik bagi keduanya dalam soal hutang-piutang, hal ini dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (البقرة : ٢٨٢)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar-benar.(Al-baqarah ayat 282)<sup>6</sup>

Kalau pinjam uang, orang berfikirannya sehat pada umumnya akan meminjam untuk tujuan tertentu yang bernilai produktif, atau usaha yang untuk membayar bunga agar tingkat bunga itu lebih rendah dari tingkat laba yang dicapai dalam usaha yang direncanakan lebih dahulu.<sup>7</sup>

Seperti yang telah ada pada masyarakat Kecamatan Kaloran kabupaten Temanggung, secara umum masyarakat di kecamatan Kaloran ini bertaraf hidup relatif baik dengan tingkat kemiskinan yang tidak terlalu tinggi akan tetapi tampaknya masyarakat kecamatan Kaloran ini dipandang masih layak

---

<sup>5</sup> Abu Sura'I Abdul Hadi MA. "*Bunga bank dalam Islam*" Surabaya : Al-Ikhlash, th 1993, hal. 131

<sup>6</sup> *Op Cit*, hal. 188

<sup>7</sup> Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan keuangan makna ekonom islam*, Jakarta : CV.Haji masagung,1988,hlm. 314

mendapatkan perhatian lewat sebuah program pemerintah melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam hal ini di harapkan kedepannya mampu mengatasi segala permasalahan yang di hadapi penduduknya selain masalah kemiskinan dan ekonomi. Dan upaya ini dijalankan lewat sebuah institusi lokal yang menguat di tingkat kecamatan yang disebut Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

UPK dalam hal ini sebagai pengelola kegiatan di kecamatan Kaloran yang dibentuk oleh Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk mengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)- PPK, yang dapat di alokasikan untuk berbagai jenis kegiatan yang mencakup kegiatan sarana/ prasarana, Pendidikan, kesehatan, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan (SPP) Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (dana bergulir).

Dengan menggunakan keputusan Musyawarah Antar Desa (MAD) sebagai landasan aspek hukum operasional yang dikuatkan oleh Surat Penetapan Camat atas nama Bupati, UPK juga menggunakan penguat aspek hukum yang dapat di gunakan dalam penguatan kelembagaan yang tercantum dalam peraturan daerah (Perda)<sup>8</sup>

Kecamatan Kaloran berada di sebelah Utara Pusat Kota Temanggung, sebenarnya lokasi yang strategis ini merupakan potensi untuk mengembangkan usaha penduduknya dalam pengolahan kekayaan alam yang ada di daerah tersebut, maka keberadaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sangat diperlukan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi

---

<sup>8</sup> Departemen Dalam Negeri RI, *Penjelasan X Pengelolaan dana bergulir*, Jakarta : Tim koordinasi pengembangan kecamatan, th. 2005



permasalahan yang menghambat perkembangan usaha dan perekonomian penduduk setempat, baik itu untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Unit Pengelola Kegiatan kecamatan Kaloran Temanggung ini, yang dalam pengelolaan dana bergulirnya yaitu antara UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dan SPP (Simpan pinjam untuk kelompok perempuan) yang dikelola UPK dengan bentuk kegiatan hutang-piutang atau pinjam-meminjam, akan tetapi dalam pelaksanaannya dalam proses pengembaliannya pihak yang berhutang dikenakan biaya jasa administrasi yang besarnya 1,5 % per bulan dari jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah / peminjam, selain itu juga apabila dalam angsurannya mengalami kemacetan maka akan dikenakan denda sebesar 1 % perhari dari jumlah tunggakan pokok pada bulan tersebut, dan juga bagi masyarakat yang akan menghutang tidak bisa menghutang secara individu atau sendiri-sendiri melainkan harus masyarakat yang mempunyai anggota minimal 5 orang, dan juga dalam pelaksanaan hutang-piutang tersebut pihak nasabah (kelompok) diberlakukan menggunakan sistim tanggung renteng atas hutangan yang telah diberikan oleh pihak UPK tersebut.

Dengan adanya tambahan dalam pengembalian yang telah ditentukan oleh pihak UPK kepada nasabah (kelompok peminjam) dan system tanggung renteng yang telah diberlakukan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada kelompok peminjam dalam pengelolaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang seharusnya disalurkan dengan tanpa memberatkan masyarakat, oleh sebab itu muncul pertanyaan, apakah pihak yang berhutang

atau dalam hal ini masyarakat setempat khususnya Masyarakat Kaloran merasa dirugikan dengan adanya tambahan dalam pengembalian tersebut?. Bagaimanakah Pandangan Hukum terhadap pelaksanaan hutang-piutang tersebut yang mana pada dasarnya pinjaman tersebut di pergunakan sebagai modal usaha atau usaha produktif. Dan Bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap hutang-piutang dengan sistem tanggung renteng?

Berangkat dari hal ini penulis ingin meneliti lebih jauh lagi, terhadap pelaksanaan hutang-piutang yang telah diaplikasikan di dalam Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tersebut, sehingga akan di peroleh gambaran yang jelas mengenai system pelaksanaan yang terdapat didalamnya, dan bagaimanakah Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan hutang-piutang di lembaga tersebut dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hutang-Piutang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa pokok masalah yang akan di jadikan arah pembahasan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pandangan Hukum Islam terhadap tambahan 1,5 % per bulan dalam pelaksanaan hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung?

2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap system tanggung renteng dalam pelaksanaan hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec.Kaloran Kab. Temanggung ?

### **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan jawaban dalam hukum Islam terhadap tambahan 1,5 % dalam pelaksanaan hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Kaloran Kab. Temanggung
2. Untuk memberikan uraian tentang sistem tanggung renteng dalam pelaksanaan hutang-piutang di Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kec. Kaloran Kab. Temanggung

### **D. Telaah Pustaka**

Dalam studi pustaka ini penulis ingin membahas lebih jauh tentang Pelaksanaan hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan Kec. Kaloran Kab. Temanggung, karena apakah selama ini pelaksanaan hutang-piutang yang telah berjalan sudah sesuai dengan pandangan hukum Islam atau malah sebaliknya? Apakah Kegiatan hutang-piutang yang selama ini dijalankan Unit Pengelola Kegiatan Kec. Kaloran Kab. Temanggung terlepas dari praktek-praktek muamalah yang di larang oleh hukum Islam?

1. Dalam sebuah penelitian yang berbentuk skripsi, yaitu karya Ismail yang berjudul, *Tinjauan hukum Islam terhadap hilah hukum hutang piutang di kecamatan tanjung Kab. Brebes*. Dalam pembahasan skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan hutang piutang di Kec.Tanjung Kab.

Brebes, yang dalam pelaksanaannya mengandung *hilah* hukum, dan dalam pembahasan skripsi tersebut juga menyimpulkan bahwa, cara-cara pelaksanaan hutang-piutang di kec. Tanjung tidak bersifat memberi pertolongan tetapi bertindak banyak merugikan orang lain, yang dalam prakteknya dapat merugikan salah satu pihak (*muqtarid*), dan *hilah* hutang-piutang dikecamatan Tanjung tersebut sengaja bertujuan ke arah yang haram, karena dengan *hilah* itu mengakibatkan kerugian orang lain, yang dalam kesimpulan akhir menyatakan bahwa *hilah* tersebut hukumnya adalah haram.<sup>9</sup>

2. Dalam sebuah penelitian yang berbentuk skripsi karya Kurniati Afni yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap pinjaman dana P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) di desa Kutoharjo kec. Kaliwungu kab. Kendal.*” Dalam pembahasan skripsi tersebut menyimpulkan bahwa dalam pinjaman dana P2KP dikategorikan *qardh* yaitu suatu bentuk transaksi utang-piutang yang didalamnya bertujuan tidak untuk mendapatkan laba atau keuntungan, dan menyimpulkan bahwa transaksi *qardh* dalam P2KP adalah diperbolehkan berdasarkan hadis nabi bahwa nabipun pernah melakukan transaksi *qardh*.<sup>10</sup>
3. Dan dalam sebuah risalah yang di susun oleh Abdul Malik yang membahas tentang *Tinjauan hukum Islam tentang kelebihan pembayaran dalam utang-piutang*. Dalam risalah tersebut menjelaskan bahwa

---

<sup>9</sup> Ismail “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hilah Hukum Hutang-putang di Kec,Tanjung Kab.Brebes*” Semarang, Fakultas Syari’ah IAIN W.S. Th.1985

<sup>10</sup> Kurniati Afni “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman dana P2KP*” (Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal”, Semarang Fakultas Syari’ah IAIN W.S. Th. 2008

pembayaran utang yang ditimbulkan dari utang untuk keperluan produktif dan hutang untuk keperluan konsumtif, dan dari hasil analisa menyimpulkan bahwa kelebihan pembayaran yang terjadi pada utang-piutang yang bersifat konsumtif hukumnya termasuk riba, kecuali kelebihan itu berasal dari kehendak si berhutang tanpa adanya perjanjian lebih dahulu. Dan pembayaran kelebihan yang terjadi pada utang-piutang yang bersifat produktif dimana pihak berhutang telah keuntungan dengan pinjaman tersebut maka hal ini diperbolehkan.<sup>11</sup>

4. Selain itu pula penulis juga merujuk dari skripsi yang disusun oleh Dwi Anugerah tahun 2006 tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Simpan-Pinjam (Studi Kasus Pelaksanaan Simpan Pinjam Di Koperasi "Fastabiq" Rumah Sakit Roemani Semarang*. Menyimpulkan bahwa pelaksanaan Simpan Pinjam Di Koperasi tersebut masih bersifat konvensional dengan kriteria adanya bunga yang terdapat dalam Simpanan dan Pinjaman Di dalam Koperasi tersebut. Dan bunga yang terdapat didalamnya adalah terdapat unsur riba dimana terdapat tambahan (bunga) sebagai imbalan atas tempo pembayaran dalam setiap pengembalian simpanan atau pinjaman tersebut, dan hukum bunga yang ada dalam koperasi tersebut adalah haram/ tidak diperbolehkan.

Berdasarkan literature yang di jelaskan diatas, maka menurut penulis pelaksanaan hutang piutang dalam kegiatan muamalah yang lebih luas lagi perlu mendapatkan kajian yang mendalam dengan tujuan mendapat kepastian

---

<sup>11</sup> Abd. Malik "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Kelebihan Pembayaran dalam Utang-Piutang*" Semarang, Fakultas Syari'ah IAIN W.S. Th.1982

mengenai kedudukan orang yang meminjam, dalam hal ini masyarakat Kec.Kaloran yang melakukan pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, untuk mengembangkan produksi mereka yang sangat membutuhkan modal yang tidak sedikit. Karena hal ini memang program dari pemerintah lewat PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang mana dijadikan solusi pemerintah untuk mengatasi permasalahan Ekonomi masyarakat dan pada prakteknya semua PPK yang dalam program kegiatannya dijalankan oleh UPK (Unit Pengelola Kegiatan). UPK sebagai Unit pengelola kegiatan ditingkat kecamatan yang dalam penyaluran dana bergulirnya bersifat pinjaman atau hutangan yang berupa uang dan dalam pelaksanaannya pun sama yaitu tetap membebaskan biaya tambahan atau dalam Istilah UPK Biaya administrasi. Dan mengenai besarnya tambahan adalah 1,5 % Per bulan. Akan tetapi dengan karakteristik masyarakat kecamatan Kaloran yang masih sangat mengharapkan keberadaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tersebut, untuk bisa memberikan pinjaman kepada mereka. Diantara beberapa alasan ini maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian guna mencari pemecahan diantara beberapa masalah yang tersebut diatas.

Dan sampai saat ini belum ada seseorang yang melakukan penelitian dalam lembaga tersebut tentang hal yang serupa, untuk itu penulis berusaha untuk melakukan penelitian dan diharapkan yang nantinya dapat memperoleh suatu kepastian tentang Pelaksanaan hutang-piutang yang diperbolehkan oleh Islam.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.<sup>12</sup> Jenis penelitian ini di gunakan untuk mengumpulkan data tentang Pelaksanaan Hutang-piutang di unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai obyek penelitian.

### 2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Secara umum dalam penelitian biasanya sumber data dibedakan antara data primer dan data sekunder.

#### A. Data Primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data lapangan yaitu data yang diperoleh dari masyarakat, dalam hal ini adalah.<sup>13</sup> :

- a. Kepala bagian pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Kaloran Kab. Temanggung..
- b. Bagian bendahara, pemasaran dan pengelola, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Kaloran Kab. Temanggung.
- c. Anggota pengurus dan para konsumen/ nasabah.

---

<sup>12</sup> Sumadi Suryabrata, "*Metodologi Penelitian*", Jakarta : PT. Raja Grafindo, Cet. Ke-11, 1998, hal. 22

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta : Universitas Indonesia, Cet., 1942, hlm. 51

d. Masyarakat setempat (tokoh masyarakat dan tokoh agama).

#### B. Sumber Data Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan, buku, dokumen-dokumen, dan lainnya dan tentunya yang berhubungan dengan Hutang-piutang. Data ini sebagai data awal sebelum peneliti terjun kelapangan.<sup>14</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### A. Metode Observasi

Adalah metode dengan pengamatan yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Pada dasarnya Metode observasi ini digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang mana dengan metode ini dapat dilakukan penilaian atas perubahan-perubahan tersebut.<sup>15</sup>

#### B. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi) dengan responden, sehingga akan tercipta proses interaksi antara responden dengan pewawancara

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> P. Joko Subagyo, “*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*” Jakarta : PT. Rineka Cipta, cet-1, 1991, hlm.63



(peneliti). Adapun responden yang akan penulis ajukan beberapa pertanyaan tersebut antara lain <sup>16</sup>:

1. Kepala pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Kaloran Kab. Temanggung
2. Anggota pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Kaloran Kab. Temanggung
3. Pejabat Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung
4. Tokoh-tokoh masyarakat atau ulama' Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung
5. Terhadap masyarakat (nasabah) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Kaloran Kab. Temanggung

#### C. Metode Dokumentasi

Metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip buku, pada dasarnya sebagian besar data adalah berbentuk surat-surat, catatan harian majalah, notulen, laporan dan sebagainya, dalam penggunaan dokumen yang penting adalah mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain.<sup>17</sup> Namun dibutuhkan penelusuran yang sistematis terhadap dokumen yang diperoleh untuk memeriksa dan memahami data-data yang ada sehingga penulis akan terhindar dari salah satu arah

---

<sup>16</sup> Masri Sianga rimbun, Sofian Efendi "Metode Penelitian Survei" Jakarta : LP3ES, cet-6, 1985, hlm.144

<sup>17</sup> Burhan Bungin, "*Metodologi Penelitian kuantitatif ,Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publikserta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*", Jakarta : Fajar Interpretama Offis, cet-2, 2006, hlm.122

oleh bukti dokumenter yang diperoleh dan akan lebih kritis dalam menginterpretasikan kandungan yang terdapat dalam dokumen.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian adalah merupakan proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang penulis dapatkan akan nampak manfaatnya dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir<sup>18</sup>

Setelah data terkumpul maka penulis akan melakukan richeck data dari hasil lapangan, sesuai dengan permasalahan, lalu dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan kasuistik di lapangan kemudian di generalisasi dalam bentuk kesimpulan yang bersifat umum.

#### **F. Sistematika penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran isi skripsi secara keseluruhan maka penulis akan menguraikan secara global, dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini penulis akan uraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

##### **BAB II : Konsep Dasar Hutang-piutang dalam Islam**

Dalam bab ini akan dimuat antara lain: Pengertian Hutang-piutang, dasar hukum Hutang-piutang, rukun dan Syarat Hutang-piutang, Riba dalam Hutang-piutang, Konsep kafalah

---

<sup>18</sup> P. Joko Subagyo, Op.cit. hlm.104

dalam hutang-piutang dan Pendapat Ulama' terhadap pelaksanaan Hutang-piutang untuk usaha.

**BAB III : Sistem Pelaksanaan Hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Kaloran Kab. Temanggung**

Dalam bab ini dimuat tentang gambaran umum Kecamatan Kaloran yang akan menjelaskan tentang kondisi letak geografis dan Demografi Kec. Kaloran, yang didalamnya juga akan menjelaskan tentang sekilas Profil Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dan Sistem Pelaksanaan Hutang-piutang yang selama ini di praktekkan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Kaloran.

**BAB IV : Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pelaksanaan Hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Kaloran.**

Dalam bab ini akan membahas data dari temuan lapangan yang meliputi analisis Sistem Pelaksanaan Hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Kaloran Temanggung. Yang di dalam pelaksanaan hutang-piutang tersebut terdapat tambahan 1,5 % per bulan, dan terdapat sistem Tanggung Renteng yang diterapkan oleh pihak UPK kepada nasabah.

**BAB V : Penutup**

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup. Dan psada bagian akhir berisi lampiran-lampiran dan daftar pustaka.

## BAB II

### KONSEP DASAR HUTANG-PIUTANG DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Hutang-Piutang

Pengertian hutang-piutang yang akan penulis kemukakan disini ada dua pengertian. Pengertian dari segi Etimologi (bahasa) dan pengertian dari segi terminology (*istilah*) para ulama.

Dalam fiqh istilah hutang-piutang diistilahkan dengan دين \ القرض

##### 1. Pengertian Hutang-Piutang menurut Etimologi (*bahasa*)

Menurut Sayid Bakri Al-Dimyati,<sup>1</sup> dalam I'anath Thalibin, pengertian hutang- piutang menurut bahasa yaitu

القرض لغة القطع

Artinya : *Al-Qardlu* secara bahasa berarti "putus".

Dari kata قرض yang bermakna قطع (putus) dari masdar قرضاً.<sup>2</sup>

##### 2. Pengertian Hutang-Piutang Menurut Istilah

Menurut Sayid Bakri bin Muhammad Syato Al-Dimyati dalam I'anath Thalibin mengatakan :

تمليك الشيء على ان يرد مثله<sup>3</sup>

Artinya: Memberikan sesuatu hak milik yang nantinya harus dikembalikan dalam keadaan yang sama".

Sedangkan menurut Dr. Abu Sura'i Abdul Hadi: "hutang-piutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada

---

<sup>1</sup> Sayid Bakri Al-Dimyati, *I'anaih Al-Thalibin*, Jus III, Al-Ma'arif, Bandung : hlm. 48

<sup>2</sup> Warson Munawwir "Kamus Al-Munawir" Surabaya, Cet ke-4, th. 1997. hlm.1108

<sup>3</sup> Sayid Bakri Al-Dimyati. *Op.Cit.*, hlm. 50

yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian mengembalikan penggantinya.”<sup>4</sup>

Menurut Chairuman Pasaribu Pengertian hutang-piutang ini juga sama pengertiannya dengan "Perjanjian pinjam-meminjam", yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: "Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah sama dari macam keadaan yang sama pula.”<sup>5</sup>

Menurut H.M. Anwar juga menjelaskan bahwa *Qardh* yaitu: memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi semisalnya, tetapi bukan barang tersebut dan kalau yang dikembalikan barang tersebut, bukan *qardh* melainkan *ariyah* / pinjam meminjam.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya *Fiqh Islam* memberikan pengertian tentang hutang-piutang adalah sebagai berikut: hutang-Piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan

---

<sup>4</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, MA. *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat*. Yogyakarta : Yayasan Masjid Manarul Islam Bangil dan Pustaka LSI, Cet I, 1991, hlm. 125

<sup>5</sup> Chairuman Pasaribu. Suhrawardi K. Luhis, S.H. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, Cet ke 1 1994, hlm. 136

<sup>6</sup> M. Anwar, *Fiqh Islam*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1998, hlm. 52

perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.<sup>7</sup>

Misalnya, Si A menghutang uang dari B Rp 100,000,- Kata si B aku piutangkan kepada saudara Rp 100,000,- dan dijawab Si A aku terima.

Si A dinamai : *Muqtaridh* (yang berutang)

Si B dinamai : *Muqridh* (yang berpiutang)

Kata keduanya: *Sighah* (Ijab dan Qobul).<sup>8</sup>

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa dalam hal hutang-piutang, harus ada satu pihak untuk memberikan haknya kepada orang lain, dan adanya pihak tersebut untuk menerima haknya untuk ditasyarufkan yang pengembaliannya ditanggungkan pada waktu yang akan datang.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa hutang-piutang menurut hukum Islam adalah: Memberikan sesuatu kepada seseorang sebagai pinjaman dengan perjanjian orang yang menerima pinjaman akan mengembalikan barang (sesuatu) tersebut setelah mampu membayar dalam keadaan yang sama.

## **B. Dasar Hukum Hutang-Piutang**

Memberi hutang adalah termasuk perbuatan kebajikan, karena pada prinsipnya adalah untuk memberikan pertolongan kepada sesama. Bagi orang yang berhutang sebetulnya berhutang itu mubah. Islam tidak menganggap

---

<sup>7</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung : PT Sinar Baru Algensindo, Cet ke- 27 Edisi Revisi, 1994, hlm. 306

<sup>8</sup> Ibrahim Lubis, Bc. Hk. Dipl. Ec. "*Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*" Jakarta: Kalam Mulia, cet-1, 1995, hlm. 359

hutang sebagai perbuatan *makruh*, sehingga jangan sampai orang yang sedang dalam keadaan butuh merasa keberatan karena menjaga harga diri. Begitu pula Islam tidak menganggapnya sunnah, sehingga jangan sampai orang ingin melakukannya karena mengharapkan pahala. Jadi hutang adalah mubah, sehingga tidak akan melakukan hutang kecuali orang yang benar-benar kepepet dan bukanlah soal yang tercela karena Rasulullah SAW sendiri pernah berhutang.<sup>9</sup>

Adapun mengenai dasar hukum di syari'atkannya hutang-piutang, disini penulis merujuk pada karya Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnahnya, yang mana dalam memberikan dasar hukum disyari'atkannya hutang piutang beliau mengambil pada dua sumber yaitu Al-Qur'an dan al-Hadits, sebagaimana berikut :

a. Dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (البقرة : ٢٨٢)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar." (Qs. Al-Baqarah : 282 ).<sup>10</sup>

b. Al-qur'an Surat Al-Isro' ayat 34

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (الاسراء : ٣٤)<sup>11</sup>

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan

<sup>9</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, MA. *Op.cit.*, hlm. 126

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah, Al-Qur'an, Semarang : CV Toha Putra, 2002, hlm 59

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 389

cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti akan diminta pertanggung jawabnya." (Al-Isro': 34 )

Dalam surat *Al-Isro'* ini menjelaskan bahwa apabila telah diikat perjanjian hutang-piutang untuk jangka waktu yang tertentu, maka wajiblah itu ditepati dan pihak yang berhutang perlu membereskan hutangnya menurut perjanjian itu. Dan menepati janji adalah wajib, dan setiap orang bertanggung jawab akan janji-janjinya. Mengingkari janji dan menunda-nunda pembayaran hutang akan menimbulkan kesulitan-kesulitan serius dikemudian hari, baik di dunia maupun di akhirat, karena itu barang siapa berhutang hendaklah bersegera membereskannya, supaya dapat hidup lebih tenang.

c. Al-qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا  
أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة

(۲ :

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) *hadyu* (hewan-hewan qurban) dan *qala'id* (hewan-hewan qurban yang diberi tanda) dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi *Baitulharam*; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan *Ihrom*, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah



kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya "(Al-Maidah ayat 2).<sup>12</sup>

Dalam ayat ini yang terpenting adalah adanya unsur "tolong-menolong", dimaksudkan supaya tidak menimbulkan beban dan kerugian bagi orang lain, dalam tolong menolong seseorang (karena kesulitan) hendaknya diperhatikan bahwa memberi bantuan itu tidak untuk mencari keuntungan dan hanya sekedar mengurangi/ menghilangkannya, karena bertentangan dengan kehendak Allah.

d. As-sunah

Sedangkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Dapat penulis kemukakan antara lain dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين الا كان كصدقتها مرة (رواه ابن ماجه)<sup>13</sup>

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud : "Sesungguhnya Nabi Besar Muhammad SAW, bersabda Seorang muslim yang mempiutangi seorang muslim dua kali, seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali".

Dalam hadist Abi Hurairah, bahwa Nabi bersabda yang artinya "barang siapa yang melepaskan seorang mukmin dari salah satu penderitaannya di dunia ini, maka Allah akan melepaskan dia dari salah satu penderitaannya pada hari kiamat nanti". HR. Muslim.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal.142.

<sup>13</sup> Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazidal qutni, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, Darul Fiqri, 207-275 H, hal 812

<sup>14</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, MA, *Op.cit*, hlm. 126

### C. Rukun dan Syarat Hutang-Piutang

Dalam pelaksanaan *qardh* / hutang-piutang terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus di penuhi.

Secara bahasa rukun adalah kata *mufrad* dari kata jama' "Arkaana", yang artinya adalah asas atau sendi atau tiang yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan ibadah dan sesuatu itu termasuk didalam pekerjaan itu.<sup>15</sup>

Adapun Syarat secara bahasa adalah asal maknanya: Janji menurut istilah syara' ialah sesuatu yang harus ada, dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada didalam pekerjaan itu.<sup>16</sup> *Qardhpun* dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan Syara', selain itu *qardh* pun dipandang sah setelah adanya *Ijab* dan *qobul*, seperti pada jual beli dan hibah.<sup>17</sup>

Adapun rukunnya *qardh* adalah sebagai berikut:

1. *Sighat Aqad* (Perjanjian dua pihak yang berhutang)
2. Orang yang berhutang dan yang berpiutang (*Aqid*)
3. Benda yang di hutang kan yaitu sesuatu yang bernilai (*Ma'qud alaih*).<sup>18</sup>

Sedangkan untuk syarat hutang-piutang yang berkaitan erat dengan rukun-rukunnya antara lain :

*Pertama*, karena utang- piutang sesungguhnya merupakan sebuah

---

<sup>15</sup> M. Abdul Mujib, et al. Kamus Istilah fiqh, Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, 1995, Cet. II. Hlm. 300

<sup>16</sup> Ibid. hlm. 342

<sup>17</sup> Rachmat Syafei, MA. " Fiqih Muamalah" Bandung, CV. Pustaka setia, Cet.3, 2006, hlm. 153

<sup>18</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Kalam Mulia, Cet-I, 1995, hlm. 360.

transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui *ijab* dan *qobul* yang jelas, sebagaimana jual beli, dengan menggunakan lafadz *qardh* atau yang sepadan dengannya. Masing-masing pihak harus memenuhi kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan *irodah* (kehendak sendiri).<sup>19</sup> Dan juga karena perjanjian hutang-piutang adalah merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak berhutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian hutang piutang juga hanya dipandang sah bila dilakukan oleh orang-orang yang berhak membelanjakan hak miliknya, yaitu orang yang telah balik dan berakal sehat.<sup>20</sup>

*Kedua*<sup>21</sup>, harta benda yang menjadi obyeknya harus *mal mutaqawwimin*. Mengenai jenis harta benda yang menjadi obyek utang-piutang terdapat perbedaan pendapat dikalangan di kalangan fuqaha mazhab. Menurut fuqaha mazhab Hanafiah *aqad* hutang-piutang hanya berlaku pada harta benda *al-misliyat*, yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda *al-qimiyyat* tidak sah dijadikan obyek pinjaman seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain- lain. Menurut fuqaha Madzhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam boleh diberlakukannya akad pinjaman, baik berupa harta benda *al-misliyyat* maupun *al-qimiyyat*.

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, M.A. dalam bukunya yang

---

<sup>19</sup> Ghutron A. Mas'adi, M.Ag. *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cet I, 2002 hlm. 173

<sup>20</sup> Ahmad Azhar Basyir, MA " Hukum Islam Tentang Riba dan Utang-piutang ,Gadai": Bandung, PT. Alma'arif, Cet-2, 1983, hlm 38

<sup>21</sup> Ghutron A. Mas'adi, M.Ag. Op.cit, hal 73

berjudul "*Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang, Gadai*" menjelaskan bahwa obyek utang-piutang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaanya mengakibatkan musnahnya benda hutang.
2. Dapat dimiliki.
3. Dapat diserahkan kepada yang memiliki.
4. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan<sup>22</sup>.

*Ketiga*,<sup>23</sup> akad utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu *persyaratan* diluar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang menghutangi).

#### **D. Riba Dalam Hutang-Piutang**

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan hidup manusia juga bertambah banyak dan hal ini sudah merupakan kenyataan. Mungkin pada saat kita berada dalam kesulitan dan pada saat kesempatan lain berada dalam kecukupan, oleh karena itu sebagai manusia kita diperintah oleh Allah SWT untuk saling tolong menolong dengan jalan membantu meringankan beban penderitaan orang lain yang membutuhkan bantuan kita, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-qur'an Surat Al-Maidah Ayat : 2.

Dengan adanya tolong-menolong tersebut dapat melembutkan hati orang yang mendapatkan bantuan dan dapat menyatukan jiwa bagi orang yang memberi bantuan karena menolong orang yang dalam kesusahan adalah termasuk akhlak yang baik.

---

<sup>22</sup> Ahmad Azhar Basyir, MA. Op.cit hal 39

<sup>23</sup> Opcit hal 173

*Aqad qardh* dimaksudkan untuk berlemah lembut sesama manusia, menolong urusan kehidupan mereka dan melicinkan bagi sarana hidup mereka, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk *mengeksploitir*.<sup>24</sup> Dari sinilah bahwa hukum memberi hutang itu adalah sunnat, bahkan dapat menjadi wajib memberi hutang terhadap orang yang terlantar atau orang yang membutuhkan. Akan tetapi dalam melakukan transaksi hutang-piutang itu kadang bisa menjadikan hal yang baik menjadi buruk, dan yang halal menjadi haram, ini bisa terjadi dalam pengembalian hutang dengan adanya kelebihan. Dan di satu sisi dalam hal hutang-piutang melebihi bayaran dari pembayaran hutang adalah "*Riba*".

Sebagaimana sabda rasulullah Saw :

عن علي رضي الله عنه قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا (رواه الحارث بن أبي سلمة)

25

Artinya: Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari macam riba. Hadist Riwayat Al-harits bin Abu Salamah.

Secara bahasa riba (الربا) bermakna: ziyadah (زيادة – tambahan ). Dalam pengertian lain, secara linguistic riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.<sup>26</sup>

Di sisi lain, Allah juga memberikan aturan secara tegas dalam utang

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, "*Fiqih Sunnah*", *Jus*, 12 . Terj. H. Kamaluddin, Pustaka Percetakan tth, hlm.132.

<sup>25</sup> Al-Hafidz bin Hajar Al Asqolani, "*Bulughul Marom*", Bairut, Darul Kutub Ilmiah, tth. Hlm.176

<sup>26</sup> Muhammad Syafi'i Antonio "*Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* " Jakarta, Gema Insani, cet.1, 2001, hlm 37

piutang yang merupakan bagian dari transaksi ekonomi (*mu'amalah maliyah*), dan ketegasan aturan transaksi ekonomi tersebut tercermin dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29 sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩ : نساء)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta yang beredar diantaramu secara bathil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan Jangan kamu saling membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu.<sup>27</sup>

Salah satu transaksi yang termasuk *batil* adalah pengambilan riba. Menurut penjelasan Abu Sura'i Abdul Hadi yang dinamakan riba adalah *tambahan* yang diberikan oleh *muqtaridh* kepada *muqridh* atas pinjaman pokoknya, sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang telah disyaratkan. Maka riba yang dimaksud dapat diidentifikasi sebagai berikut ;

1. Adanya kelebihan dari pokok pinjaman.
2. Kelebihan pembayaran tersebut sebagai imbalan atas tempo pembayaran.
3. Adanya jumlah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi. Maka transaksi yang mengandung tiga unsur ini dinamakan riba.<sup>28</sup>

Sementara itu Syafi'I Antonio (2001) \_ juga menjelaskan bahwa riba dapat terjadi karena dua sebab yaitu riba hutang-piutang dan riba jual beli. Riba kelompok pertama terbagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyah*. Sedang

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op.cit, hlm 107.

<sup>28</sup>. Abu Sura'I Abdul Hadi, “ *Bunga Bank dalam Islam*” Surabaya, Al-Ikhlash, th. 1993, hlm. 23

kelompok kedua riba jual beli, terbagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- a. Riba *Qardh*, ialah Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*)
- b. Riba *Jahiliyyah*, ialah Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.
- c. Riba *Fadhl*, ialah Pertukaran dengan barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi..
- d. Riba *Nasi'ah*, ialah Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.<sup>29</sup>

Selain itu juga Abd al-Razzaq Sanhuri, juga menjelaskan hal yang sama tentang macam dan bentuk riba yang diantaranya yaitu riba masa pra-Islam (*jahiliyya*), riba *al-nasi'ah*, riba *al-fadhl*, dan riba *al-qardh*. Abd al-Razzaq Sanhuri juga menegaskan bahwa larangan riba dalam semua bentuknya bermuara pada aspek *norma*, meskipun tingkat larangannya bervariasi. Berdasarkan alasan ini, riba tidak dapat dianggap sah menurut hukum kecuali dalam keadaan terpaksa (*dharuri*) atau benar-benar butuh (*haja*), menurutnya riba *al-jahiliyya* adalah bentuk riba yang paling buruk diantara sekian bentuk riba, oleh karena dilarang secara *mutlak*.<sup>30</sup>

Dan Allah SWT sudah banyak menjelaskan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 275.

---

<sup>29</sup> Muhammad Syafi'I Antonio. *Op. Cit*, hlm 41- 42.

<sup>30</sup> Sanhuri dalam Abdullah Saeed "*Bank Islam Dan Bunga*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-2, 2004, hlm.77

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة : ٢٧٥)

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>31</sup>

Batasan riba yang diharamkan oleh Al-Qur'an itu sebenarnya tidak memerlukan penjelasan yang rumit, karena sebetulnya riba adalah sebagai bentuk transaksi yang telah dikenal oleh Non Arab. Padahal bangsa yahudi telah mempraktekkan riba jauh sebelum ayat di atas turun, sampai perbuatan itu diinventarisasi oleh Al-Quran dalam kumpulan catatan kriminal mereka yang digambarkan oleh Allah pada surat An-Nisa ayat 161

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (النساء : ١٦١)

Artinya: Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang pedih. (Q.S. An-Nisa ayat 161).<sup>32</sup>

Menurut Muhammad Abduh (w. 1905) dan muridnya Muhammad Rashid Ridha, ketika menjelaskan bentuk riba yang dilarang pada masa pra-Islam, mereka menegaskan bahwa riba pada masa pra-Islam dipraktekkan

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op.cit, hlm 58

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 136



dalam bentuk tambahan pembayaran yang diminta dari pinjaman yang telah melewati batas tempo pembayaran, sehingga mengalami penangguhan yang menyebabkan meningkatnya pembayaran hutang tersebut.<sup>33</sup>

Berdasarkan pandangan Abduh dan Rashid Ridha serta Ibn Qayyim, Abd al-Razzaq Sanhuri yang merupakan pakar hukum Islam kebangsaan Mesir, juga menegaskan bahwa bunga yang dilarang adalah yang berlipat ganda, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran ayat 130 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾  
 عمران ١٣٠

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. (Q.S. Ali-Imran : 130).<sup>34</sup>

Keterangan ini berdasarkan bukti faktual dalam praktek riba pada masa pra-Islam dan juga implikasi yang ditimbulkannya sehingga menurut Sanhuri bunga yang tidak berlipat ganda tidaklah dilarang.<sup>35</sup>

Pendapat NU mengenai bunga dapat dilihat dalam keputusan sidang *Lajnah Bahtsul Masail*. Dari berbagai sidang *Lajnah Bahtsul Masail* bunga hampir sama dengan gadai. Nahdlatul Ulama' (NU) dalam Munas Ulama' di Bandar Lampung pada tahun 1992 menetapkan tiga aspirasi yang berkembang dikalangan ulama' mengenai hukum bunga :

1. Hukumnya haram berdasarkan *Qiyas* terhadap riba.
2. Hukumnya halal berdasarkan *al-maslahah*.

<sup>33</sup> Dalam Abdullah Saeed "*Bank Islam dan Bunga*", Op. Cit, hlm. 75

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op.cit, hlm. 84

<sup>35</sup> Sanhuri dalam Abdullah Saeed, "*Bank Islam dan Bunga*" Op, Cit. hlm.76

### 3. Subhat.<sup>36</sup>

Menurut Quraish Shihab (tokoh *mufassir* Indonesia) setelah menganalisis banyak hal yang berkaitan dengan ayat-ayat riba menyimpulkan *illat* keharaman riba adalah *al-Dzulm* (aniaya), sebagaimana tersirat dalam surat Al-Baqarah ayat 279;

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿البقرة ٢٧٩﴾

Artinya: "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya." (QS, Al-Baqarah: 279)

Menurutnya yang diharamkan adalah bunga atau tambahan yang dipungut secara *dzulm* (penindasan dan pemerasan) tidak semua bunga.<sup>37</sup>

Selanjutnya Quraish Shihab juga menjelaskan dalam tafsir Al-Misbahnya tentang pengertian riba, bahwa kata riba dilihat dari segi bahasa adalah penambahan. Sementara para ahli hukum mengemukakan kaidah, bahkan ada yang menilainya hadits walau pada hakekatnya ia adalah hadits *dha'if*, bahwa; "(كل قرض جر منفعة فهو حرام)"

"Setiap piutang yang mengundang manfaat (melebihi jumlah hutang), maka itu adalah haram (riba yang terlarang)."

Pandangan atau kaidah ini menurut Quraish Shihab tidak sepenuhnya benar, karena Nabi Muhammad SAW pernah membenarkan pembayaran yang

---

<sup>36</sup> Aziz Masyuri, *Masalah Keagamaan Hasil Mu'tamar dan Munas Ulama' NU*, Surabaya : Dinamika press, 1997. hlm. 368-370

<sup>37</sup> Ghutron A. Mas'adi. *Op.Cit* hlm. 166

melebihi apa yang dipinjam.<sup>38</sup>

Adapun melebihi bayaran dan sebanyak hutang, kalau kelebihan itu memang kemauan yang berhutang dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi orang yang menghutangkannya, dan menjadi kebaikan untuk orang yang membayar hutang.<sup>39</sup>

Melebihi pembayaran dari jumlah yang diterima oleh *Muqtaridh* (orang yang berhutang) dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

#### 1. Kelebihan yang tidak diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh *Muqtaridh* (orang yang berhutang) dan bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu (boleh) halal bagi *Muqridh* (orang yang memberikan hutang) hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi adalah sebagai berikut :

حدثنا أبو كريب . حدثنا وكيع عن علي بن صالح , عن سلمة بن كهيل , عن أبي سلمة , عن أبي هريرة قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فاعطى سنا خيرا من سنه وقال حياركم احاسنكم قضاء . قال أبو عيسى :  
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح .<sup>40</sup>

Artinya: Abu kuraib menceritakan kepada kami, Wakie' menceritakan kepada kami dari Ali bin Shaleh dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata "Rasulullah Saw telah menghutang Onta dan kemudian beliau bayar dengan onta yang lebih bagus dari onta yang beliau hutang itu, dan Rasulullah bersabda: "Sebaik-baik kamu semua adalah yang terbaik cara melunasi hutangnya". Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan

<sup>38</sup> Quraish Shihab " *Tafsir Al-Misbah*" Volume I, Jakarta: Laentera Hati, Cet.ke-V, 2005, hlm.591.

<sup>39</sup> Sulaiman Rasjid, *Op.Cit.*, hlm. 307

<sup>40</sup> Muhammad Fuwar Abdul Baqii, *Sunan Turmudzi*, Darul Fikri : Bairud. Juz III. Hlm. 607,

dan shahih <sup>41</sup>

## 2. Kelebihan yang diperjanjikan

Adapun kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh yang berhutang kepada pihak yang berpiutang didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka sepakati tidak boleh, dan haram bagi pihak yang berpiutang. Umpamanya yang berpiutang berkata kepada yang berhutang Saya hutangi engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian.

Sabda Rasulullah SAW :

عن علي رضي الله عنه قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا (رواه الحارث بن أبي سلمة) <sup>42</sup>

Artinya: Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari macam riba. Hadist Riwayat Al-harits bin Abu Salamah.

Sedangkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengemukakan sebagai berikut :

حدثنا هشام بن عمار . حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني عتبة بن حميد الضبي , عن يحيى بن أبي إسحق الهناي : قال : سألت أنس بن مالك : الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدى له ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له , أو حملة على الدابة , فلا يركبها ولا يقبله . إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك <sup>43</sup>

Artinya: Hisyam bin Anas menceritakan kepada kami, Ismail bin Aiyas menceritakan kepada kami, Utbah bin Khumaid Adhlobi menceritakan kepadaku, dari Yahya bin Abu Ishaq Al Hunai'i: Ia berkata saya berkata kepada Anas bin Malik: seorang laki-laki

<sup>41</sup> Muh. Zuhri dkk " *Terjemah Sunan Turmudzi*" Semarang, CV. Asy Syifa'. Jus, 2. Cet. I. thn. 1992. hlm. 671

<sup>42</sup> Al-Hafidz bin Hajar Al Asqolani, *Loc. Cit.*

<sup>43</sup> Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazidal qutni, *Sunan Ibnu Majah*, Op.cit, hlm

dari kami meminjamkan harta kepada saudaranya, lalu saudaranya itu memberi hadiah kepadanya, maka ia berkata: Rasulullah Saw Sabda apabila salah seorang dari kamu meminjamkan sesuatu kemudian diberi hadiah atau dinaikkan diatas kendaraannya maka hendaklah jangan diterimanya hadiah itu kecuali hal itu telah berjalan antara keduanya sebelum itu.

Berdasarkan uraian singkat di atas tentang pernyataan Al-Qur'an dengan diharamkannya riba maka, umat Islam harus berhati-hati dalam menjalankan segala praktek muamalah khususnya dalam praktek hutang-piutang di masyarakat, karena Allah SWT dengan keras mengecam dan melarang praktek-praktek riba di segala kehidupan sosial masyarakat.

#### **E. Konsep Kafalah Dalam hutang-piutang**

Dalam perjanjian hutang-piutang, sering terjadi bahwa yang memberikan pinjaman (*muqridh*), selain meminta jaminan yang bersifat kebendaan (dalam syari'at Islam disebut dengan gadai) juga meminta jaminan perorangan yang sering diistilahkan dengan penanggungan hutang.

Penanggungan hutang-piutang dalam praktiknya selain dapat dilakukan oleh perorangan, sering juga dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan (Bank), dan yang terakhir ini sering disebut dengan Bank guaranty.

Menurut ketentuan syari'at Islam penanggungan hutang ini diistilahkan dengan "*kafalah*" (menggabungkan), "*dhaman*" (jaminan), "*hamalah*" (beban) dan "*za'amah*" (tanggungan).<sup>44</sup> Menurut Ulama' madzhab Maliki: *Dhaman*, *kafalah*, dan *hamalah* adalah lafazh-lafazh sinonim atau semakna.<sup>45</sup>

Sementara itu menurut ahli fiqh bermadzhab Hanafi *kafalah* diartikan

<sup>44</sup> Chairuman Pasaribu., et al. "Hukum Perjanjian Dalam Islam" Op. cit. hlm. 148

<sup>45</sup> Abdulrahman Al-jaziri., Al-Fiqh Alal Madzahibil Arba'ah. Terj. Moh Zuhri, et al., "Fiqh Empat Madzhab", Jilid IV, Semarang: CV Asy Syifa'. 1994. hlm. 375.

sebagai proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi tanggungan *ashiil* dalam tuntutan/ permintaan dengan materi yang sama atau hutang, atau barang atau pekerjaan. Sedangkan imam-imam yang lainnya memberikan definisi dengan " menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang."<sup>46</sup>

Dalam syari'at Islam perjanjian penanggungan hutang atau *kafalah* dianggap sah apabila rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi. Dalam hal ini penulis menggunakan rujukan berdasarkan keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia yang menjelaskan bahwa rukun dan syarat-syarat *kafalah* adalah sebagai berikut :

1. Pihak penjamin (*Kafil*). Maksudnya adalah seseorang yang mempunyai kewajiban untuk melakukan penanggungan *kafil* ini disyaratkan harus berupa orang yang :
  - a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
  - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
2. Pihak orang yang berhutang (*Ashiil, Makfuul'anhu*) atau orang yang mempunyai hutang (orang yang ditanggung) dengan syarat :
  - a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin
  - b. Dikenal oleh penjamin
3. Pihak orang yang berpiutang (*Makfuul Lahu*). Orang yang memberi hutang dalam *kafalah* disyaratkan :
  - a. Diketahui identitasnya

---

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq " *Fiqih Sunnah*" Bandung, PT. Alma'arif, jus.13, thn. 1988. hal. 157.

- b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
  - c. Berakal sehat.
4. Obyek penjaminan (*Makfuul Bihi*), adalah sebagai sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan atau tanggungan, dalam hal ini harus dengan syarat:
- a. Merupakan tanggungan pihak / orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
  - b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
  - c. Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
  - d. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan)<sup>47</sup>

Adapun mengenai dasar hukum disyari'atkannya *kafalah*, disini penulis merujuk pada Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnahnya, yang mana dalam memberikan dasar hukum disyari'atkannya *kafalah* mengambil pada tiga sumber yaitu Al-Qur'an, al-Hadits, dan Ijma Ulama' yang diantaranya adalah sebagaimana berikut :

- a. Dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi ;

قَالُوا نَفْقَدُ صُورَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. (72)

Artinya: Mereka menjawab, "kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban onta dan aku menjamin terhadapnya."(QS. Yusuf: 72)<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Dewan Syari'ah Nasional MUI" *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*"Jakarta, CV. Gaung Persada, Cet-ke 3, th.2006 hlm.72.

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op.cit, hlm. 329.

b. Sabda Rasulullah SAW :

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

Artinya: "Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya."<sup>49</sup>

c. Para Ulama' berijmak membolehkannya, bahkan orang-orang dimasa nabipun sudah mempraktekkannya, dan sampai saat ini belum ada yang membantah tentang pembolehananya.<sup>50</sup>

Pertanggungan atau *kafalah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu sebagaimana disampaikan oleh Ulama' fiqih- sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq (1988) membagi *kafalah* menjadi dua macam yaitu :

a. *Kafalah* jiwa (bil wajhi)

*Kafalah bil wajhi* lazim juga diistilahkan dengan *kafalah* dengan jiwa, dalam hal ini ada kemestian agar pihak *kafil* menghadirkan orang yang dia tanggung (*makful lahu*)

*Kafalah bil wajhi* ini dibolehkan jika pertanggungan itu menyangkut persoalan hak manusia. Orang yang dijamin tidak disyaratkan untuk mengetahui persoalan, sebab *kafalah* ini hanya menyangkut badan, bukan berbentuk harta.

b. *Kafalah* dengan harta

*Kafalah* dengan harta ini maksudnya, perjanjian *kafalah* yang diadakan itu menyangkut pemenuhan yang bernilai benda / harta, *kafalah* dengan harta dibedakan menjadi dua *kafalah bi ad-dain* dan *kafalah untuk menyerahkan*.

<sup>49</sup> Dalam Dewan Syari'ah Nasional MUI, Op.Cit hal. 71

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq. *Op.Cit.* hlm.159.



1. *Kafalah bi ad-dain.*

*Kafalah bi ad-dain* ini adalah penjaminan oleh *kafil* untuk membayar hutang orang yang ditanggungnya. Adapun menyangkut sahnya pertanggungan terhadap hutang seseorang ini haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a) Hendaknya nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya perjanjian penjaminan.
- b) Bahwa jenis barang tanggungannya harus diketahui secara jelas.

2. *Kafalah* untuk menyerahkan

*Kafalah* untuk menyerahkan ini adalah jaminan untuk menyerahkan barang atau benda sesuai dengan waktu yang diperjanjikan misalnya penyerahan barang terhadap pembayaran yang dilakukan, berarti dalam hal ini penanggung menjamin hak pembeli.<sup>51</sup>

## **F. Pendapat Ulama' Tentang Hutang-piutang Untuk Usaha**

Kalau ditinjau dari segi kepentingan seseorang berhutang kepada orang lain adalah ada dua motif, yaitu :

1. "Berhutang sebagai bahan konsumtif, yaitu harta yang diperoleh dari hutang tersebut semata-mata untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, sehingga harta tersebut habis tanpa dapat membawa keuntungan atau laba dan juga tidak bertambah dan biasanya pembayaran hutang semacam ini dibayar dengan modal yang lain.
2. Berhutang sebagai bahan produktif, yaitu harta yang diperoleh dari hutang tersebut dijadikan modal untuk memperoleh keuntungan baik dengan jalan perniagaan maupun dengan jalan membuat produksi, karena dengan jalan demikian harta itu akan sangat besar kemungkinannya untuk menjadi lebih banyak, sehingga harta tersebut tidak habis punah, tetapi justru akan bertambah.

---

<sup>51</sup> Sayid Sabiq "*Fiqih Sunnah*" Jus 13. *Op.Cit.* hlm. 160-162.

Perlu kita kaji agak lebih mendalam agar tampak efek-efek yang ditimbulkan oleh hutang-piutang sebagai mana tersebut diatas, karena kalau utang-piutang itu bersifat konsumtif maka pihak berpiutang tidak dapat mengharapkan atau meminta laba dari harta yang dihutangkan tadi karena pihak berhutang tidak mungkin mendapat laba dari harta tersebut. Sedangkan hutang piutang yang bersifat produktif akan sangat besar kemungkinannya harta tersebut akan bertambah, dalam hal ini pihak berpiutang boleh meminta laba dari hasil harta yang dihutangkan tersebut dari pihak yang berhutang sesuai dengan perjanjian bersama, karena hutang-piutang yang semacam ini memang dilakukan untuk memperoleh laba. Tetapi pihak berpiutang biasanya juga tidak lepas dari resiko-resiko yang mungkin terjadi, yaitu pihak berpiutang akan ikut menanggung kerugian apabila usaha produksi atau perniagaan tersebut jatuh pailit, namun apabila mendapat laba pihak berpiutang boleh menerima atau meminta labanya sebagai hasil dari peminjaman harta tersebut sesuai dengan perjanjian.<sup>52</sup>

Sesuai dengan contoh yang diajukan oleh Rasyid Ridha tentang orang yang menyerahkan hartanya untuk menarik keuntungan dengan ketentuan bahwa sebagian tertentu dari keuntungannya itu diserahkan kepada siempunya harta. Ini memang yang dinamakan usaha bersama (*qiradh*) dan tidak saja termasuk dalam memakan riba.<sup>53</sup>

Sebagaimana yang di jelaskan dalam buku *fatwa-fatwa muamalah*

---

<sup>52</sup> Malik Abdul."Tinjauan Hukum Islam Tentang kelebihan pembayaran Dalam Hutang piutang", Risalah Sarjana Agama, Semarang; Perpustakaan Fak.Syari'ah IAIN, 1982, hlm26

<sup>53</sup> Fuad Mohd Fahrudin " Riba Dalam Bank, Koprasi, Perseroan dan Asuransi"PT. Alma'arif, Bandung.Cet ke-1V, hlm.50

*Kontemporer* terjemahan A. Syakur tentang pengalihan hutang menjadi modal usaha bahwa, Seseorang telah meminjam sejumlah uang kepada orang lain, dan setelah beberapa waktu peminjam berkata: "Saya akan gunakan uangmu yang ada padaku untuk usaha dagang, dan akan ku berikan sejumlah keuntungan kepadamu dari usaha tersebut."

Dari kecakapan lafadh diatas, dalam kaidah fiqh disebutkan :

هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها ؟

Artinya: "Apakah yang diperhitungkan itu lafadh aqad, ataukah maknanya ?"<sup>54</sup>

Pendapat Pertama : yang dihitung lafadhnya.

Pendapat Kedua : yang dihitung maknanya.

Dari kaidah fiqhiyah diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut pendapat pertama, ucapan sebagaimana diatas menjadi akad *qiradh*, sedangkan pendapat kedua, menganggap ucapan diatas itu masih sebagai akad *qardh* (hutang-piutang)

Menurut Ash-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani dalam bukunya Fatwa Muamalah *As-Asyaiah* yang diterjemah oleh A. Syakur tersebut, menjelaskan bahwa transaksi sebagaimana diatas diperbolehkan dengan syarat si peminjam menunjukkan uangnya tersebut kepada orang yang meminjamkannya dan dengan menyaksikan bahwa uang tersebut telah berpindah statusnya dari hutang menjadi amanah baginya untuk kemudian dijadikan sebagai modal usaha dagang. Karena apabila uang tersebut masih berstatus sebagai hutang

---

<sup>54</sup> Moh. Adib Bisri." *Terjemahan Al-FARAIDUL BAHIIYYAH, Risalah Qawa-Id Fiqh*, Kudus, "MENARA KUDUS" th. 1977., hlm.74

kemudian ia jadikan sebagai modal usaha dagang, maka hal itu bisa menjadikan hutang dengan manfaat tertentu bagi orang yang meminjamnya. Disamping itu, ia juga harus menjelaskan jenis usaha yang akan dijalankan serta jangka waktunya, kemudian ia juga tidak boleh menggunakan keuntungan untuk diputar lagi dalam usahanya tersebut.

Sebagai mana yang telah dijelaskan diatas bahwa pemindahan hutang menjadi modal usaha adalah boleh namun harus dengan syarat-syarat dan kesepakatan yang jelas yang sesuai menurut Islam, kegiatan muamalah seperti yang di uraikan diatas dalam Islam disebut *Qiradh* atau *Mudharabah*.

Adapun pengertian *mudharabah* sendiri adalah sebagai berikut:

*Mudharabah* adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *Muqaradhadh* bahasa penduduk Hijaz<sup>55</sup>. Namun pengertian *qiradh* dan *mudharabah* adalah satu makna.<sup>56</sup>

Para imam mazhab sepakat atas kebolehan nya *Mudharabah* atau *Qiradh*, yaitu seseorang menyerahkan modal kepada orang lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama.<sup>57</sup>

Menurut bahasa, *mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan dan atau bepergian.

Sedangkan menurut Istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama' sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> Syeh Ibnu khosim al-bajuri, "Al-bajuri ala ibnu khosim al-ghozi" Semarang, Tho ha putra, Juz 11, tth, hal 20

<sup>56</sup> Imam Taqiyuddin, "Khifayatul ahyar" Surabaya, Muhammad bin Ahmad bin nabhan wa'auladihi, juz 1. tth, hal. 301

<sup>57</sup> Syaikh al-Allamah M. *Rahmahal-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, "Fiqh Empat Madzhab", HASYIM PRESS. Cet-1, 2001, hal 295

1. Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang ber *aqad* yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah:

عقد على الشركة في الربح بمال من احد الجانبين وعمل من الآخر<sup>58</sup>

“Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”.

3. Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah:

عقد توكيل صادر من ربح المال لغيره على ان يتجر بخصوص النقدين

(الذهب والفضة)<sup>59</sup>

“Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)”

4. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah:

عبارة أن يدفع صاحب المال قدرا معيناً من ماله إلى من يتجر فيه بجزء

مشاع معلوم من ربحه<sup>60</sup>

“Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.

---

<sup>58</sup> Al-jaziri,” *Fiqh ‘Ala madzabib al-Arba’ah* “ Mesir: Attijariyatul Akbar Hal.34,35

<sup>59</sup> *Ibid.* hal.38

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 42

5. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mudharabah ialah:

عقد يقتضى أن يدفع شخص لآخر مالا ليتجرفه<sup>61</sup>

“Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan”.

Setelah kita ketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama' di atas, kiranya dapat dipahami bahwa mudharabah atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.

Dasar hukum *Mudharabah*, Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* adalah boleh (mubah), adapun dasar hukumnya ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib RA, bahwasanya Rasulullah SAW, telah bersabda:

ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقا رضة وخلط البر با لشعير للبيت ولا

لبيع<sup>62</sup>

“Ada tiga perkara yang diberkati; jual beli yang ditangguhkan, memberi modal dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual”.

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hal. 44

<sup>62</sup> *Op. Cit*, hlm. 768

**BAB III**  
**SESTEM PELAKSANAAN HUTANG-PIUTANG**  
**( Study Kasus di Unit Pengelola Kegiatan / UPK Kec. Kaloran Kab.**  
**Temanggung)**

**A. Gambaran Umum Kecamatan Kaloran**

**a. Letak Geografi Kecamatan Kaloran**

Untuk mengetahui dengan jelas dimana sesungguhnya letak geografis daerah penelitian yang menjadi obyek peneliti, disini akan penulis sampaikan seperlunya atas dasar dokumentasi yang penulis dapati di kecamatan Kaloran.

Kaloran adalah nama kecamatan dari wilayah tingkat II Kabupaten Temanggung propinsi Jawa Tengah.

Adapun Letak daerah ini di sebelah selatan Perbatasan kabupaten Semarang, pada ketinggian  $\pm 670 - 1000$  meter dari permukaan laut.

Adapun batas-batas daerah kecamatan kaloran adalah sebagai berikut:

- 1) Disebelah Utara dibatasi oleh : Kecamatan Sumowono Kab. Semarang
- 2) Disebelah Selatan dibatasi oleh : Kecamatan Kranggan
- 3) Disebelah Timur dibatasi oleh : Kecamatan Pringsurat
- 4) Disebelah Barat dibatasi oleh : Kecamatan Kandangan

Adapun mengenai luas daerah Kecamatan Kaloran adalah 6391.600 Ha, dengan pembagian berdasarkan prosentase keadaan tanah adalah : 40 % tanah datar dan 60 % tanah berbukit.

Kecamatan kaloran terdiri dari 14 desa dengan nama-nama desa sebagai berikut :

No	Nama Desa	No	Nama Desa
1.	Desa Kaloran	8.	Desa Kemiri
2.	Desa Tlogowungu	9.	Desa Gebog
3.	Desa Gandon	10.	Desa Tegowanu
4.	Desa Tleter	11.	Desa Keblukan
5.	Desa Getas	12.	Desa tepusen
6.	Desa Kalimanggis	13.	Desa Gandulan
7.	Desa Tempuran	14.	Desa Kwaraan

Sumber : Data Geografi Kecamatan Kaloran 2007<sup>1</sup>

#### **b. Kondisi Demografi Kecamatan Kaloran**

Jumlah penduduk Kecamatan Kaloran secara keseluruhan mencapai 44.634 jiwa, dari jumlah itu secara garis besar terbagi menjadi menjadi dua yaitu laki-laki sebanyak 22.373 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 22.261 jiwa sehingga terlihat pulalah bahwa kaum laki-laki lebih banyak dari pada kaum perempuan.

##### **1) Ekonomi**

Adapun mata pencaharian penduduk kecamatan kaloran sebagian besar adalah bertani.

Untuk lebih jelasnya mengetahui perekonomian penduduk kecamatan kaloran adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Kantor Kecamatan Kaloran , Jum'at, 23 Nopember 2007,



TABEL I

Tabel mata pencaharian penduduk  
Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung 10 tahun keatas

NO	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	6700 jiwa
2.	Buruh tani	2020 jiwa
3.	Buruh swasta	1012 jiwa
4.	PNS	264 jiwa
5.	Pengrajin	98 jiwa
6.	Pedagang	702 jiwa
7.	Peternak	567 jiwa
8.	Sopir	74 jiwa
9.	TNI / Polri	35 jiwa
10	Montir	16 jiwa
11	Lain-lain	33.146 jiwa
	Jumlah	44.634 jiwa

Dari tabel diatas tersebut tampaklah jelas bahwa diwilayah kecamatan Kaloran banyak masyarakat yang mengelola pertanian, peternak, dan pedagang disamping itu terlihat juga pada tabel nomor 11 tercantum bagian lain-lain yang dimaksud disini adalah bahwa diantara para penduduk yang bersifat hitrogen itu ada yang mempunyai pekerjaan dan ada yang tidak jadi lain-lain adalah para penduduk yang tidak memiliki pekerjaan atau mata pencaharian yang tetap, melihat keadaan perekonomian masyarakat yang tidak merata ini maka keberadaan PPK yang dikelola oleh UPK diharapkan mampu untuk menyetabilkan kondisi permasalahan ditengah-tengah masyarakat khususnya dibidang Ekonomi.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Monografi Kecamatan Kaloran tahun 2007

## 2) Sosial Keagamaan

Penduduk kecamatan Kaloran mayoritas memeluk agama Islam hanya sebagian kecil saja yang memeluk agama lain.

Adapun jumlah pemeluk agama-agama yang peneliti dapatkan datanya dari kantor kecamatan Kaloran adalah sebagai mana tercantum dalam tabel di bawah ini :

**TABEL II**

**Data Penduduk Pemeluk Agama  
Kecamatan Kaloran tahun 2007**

<b>No</b>	<b>Nama Agama</b>	<b>Jumlah Pemeluk</b>
1.	Islam	32.827 jiwa
2.	Kristen	2.863 jiwa
3.	Kristen Katolik	1.235 jiwa
4.	Budha	7.709 jiwa
5.	Hindu	-
6.	Lain-lain	-
	<b>Jumlah</b>	<b>44.634 Jiwa</b>

Atas dasar tabel diatas ini nyatalah bahwa Islam merupakan agama yang paling banyak pemeluknya, namun demikian kehidupan antar umat beragama disana penuh dengan toleransi yang tinggi, belum pernah ada terjadi pertengkaran antar umat beragama dan tidak ada saling mengganggu dalam menjalankan ajaran (Ibadah) masing-masing. Oleh karena banyaknya agama yang dianut disana (Kecamatan Kaloran), maka tempat-tempat peribadatanpun beraneka ragam.

Adapun jumlah tempat peribadatan yang menjadi sarana dalam menjalankan Ibadah masing-masing para pemeluk agama di Kecamatan Kaloran adalah sebagai berikut:

1. Masjid = 89 Buah
2. Mushola = 83 Buah
3. Gereja Kristen= 8 buah
4. Gereja Katolik = 2 Buah
5. Klenteng= -
6. Wihara = 47 Buah.<sup>3</sup>

### 3) Pendidikan

Seperti penyusun kemukakan pada bagian sebelumnya dimana penduduk kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung terdiri dari berbagai usia, keanekaragaman usia itu menyebabkan pula perbedaan pendidikan masing-masing, ada yang tamat perguruan tinggi, Akademi, sekolah menengah, sekolah dasar, bahkan ada yang tidak mengalami pendidikan formal di bangku sekolah, akan tetapi menekuni di pondok pesantren, dan menekuni pada pengajian rutin di masjid-masjid dan mushola-mushola namun banyak juga yang tidak berpendidikan formal dan tidak juga datang kepondok pesantren atau ketempat pengajian rutin. Untuk mengetahui dengan jelas tentang gambaran yang sebenarnya, penyusun akan kemukakan dalam draf tabel sebagai berikut.

Adapun Jumlah penduduk kecamatan Kaloran menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> *Ibid*

TABEL III

Penduduk menurut tingkat pendidikan Kecamatan Kaloran

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD	1.705 jiwa
2.	SLTP	5.973 jiwa
3.	SLTA	1.470 jiwa
4.	D I/D II/D III	148 jiwa
5.	Sarjana	110 jiwa
6.	Usia 7-45 th tdk pernah sklh	393 jiwa
7.	Belum sekolah	4.712 jiwa

Sumber : Data Monografi Kecamatan Kaloran 2007 <sup>4</sup>**B. Profil Unit Pengelola Kegiatan (UPK)****1. Sejarah Terbentuknya UPK**

Program pengentasan kemiskinan di Indonesia sudah banyak dijalankan sejak krisis moneter dan ekonomi melanda Indonesia sekitar tahun 1997, Pelaksanaannya selalu dikoreksi atau diperkaya dengan upaya lebih mengkokohkan keberdayaan institusi komunitas agar pada masa berikutnya upaya penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, sebagai mana Program Pengembangan Kecamatan (PPK). PPK adalah bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dengan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. PPK merupakan koreksi terhadap sistem pembangunan terdahulu yang pada umumnya dinilai sentralistik, PPK juga merupakan penyempurnaan terhadap berbagai program penanggulangan kemiskinan terdahulu seperti IDT dan P3DT. Dalam hal ini PPK diharapkan dapat menjadi suatu sistem

<sup>4</sup> *Ibid*

pembangunan yang memungkinkan segala bentuk sumberdaya pembangunan dapat di akses secara merata dan adil oleh seluruh pelaku dan komponen bangsa.<sup>5</sup>

Pada awal tahun 2003 di Kecamatan Kaloran sosialisasi mengenai Program Pengembangan kecamatan (PPK). PPK yang merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.<sup>6</sup>

Berhubungan dengan hal tersebut diatas dan menindak lanjuti surat menteri dalam negeri nomor: 410/2918/SJ tanggal 29 Oktober 2004 perihal Program Pemberdayaan Masyarakat dengan transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah pusat tetap akan melanjutkan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).<sup>7</sup> Yang mana dalam sosialisasi PPK tersebut dilakukan melalui dua cara yaitu 1). Pertemuan langsung 2). Media informasi. Adapun dalam pensosialisasian PPK tingkat kecamatan diberikan oleh FK yaitu fasilitator kecamatan. Tugas FK disini memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Kaloran mengenai Program

---

<sup>5</sup> Departemen dalam negeri "*Petunjuk Tehnis Oprasiona Program Pengembangan Kecamatan*" Tim Koordinasi PPK, Jakarta, 2005, hal.1

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Ismail, sebagai ketua UPK Kecamatan Kaloran Pada hari juim'at, jam. 0900, tgl 23 Nopember 2007

<sup>7</sup> *Loc. Cit*

Pengembangan Kecamatan (PPK) melalui FD (Fasilitator desa), yang mana tujuan dari Program PPK tersebut ingin memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada di tingkatan Kecamatan, terutama masyarakat di pedesaan yang miskin modal. Diharapkan setelah mendapatkan pinjaman modal usaha yang mereka lakukan akan meningkat dan lebih maju. Program PPK tersebut merupakan dana dari Bank Dunia yang memberikan bantuan modal kepada masyarakat di pedesaan khususnya ditingkat kecamatan, agar usahanya lebih maju sehingga bisa menciptakan lapangan kerja.<sup>8</sup>

Dalam mensosialisasikan Program PPK tersebut Fasilitator Kecamatan (FK) melalui Fasilitator desa (FD) langsung terjun ke dusun-dusun dan Rt-Rw dan mengadakan pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagai kelompok calon peminjam dana PPK. Selain itu untuk menjamin proses pengelolaan kegiatan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan berdasarkan pada azas dan prinsip PPK maka dalam pengelolaannya dibentuklah suatu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang berkedudukan di tingkat kecamatan, UPK ini dibentuk untuk kepentingan operasional PPK, yang dalam kepengurusannya dipilih oleh masyarakat melalui Musyawarah Antar Desa yang kemudian ditetapkan dan disahkan dengan surat Keputusan Camat atas nama Bupati.<sup>9</sup>

Oleh karena itu UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dapat bertindak sebagai representasi masyarakat warga penduduk kecamatan, dan

---

<sup>8</sup> Departemen Dalam Negeri RI, "*Penjelasan I Sosialisasi PPK*" Jakarta. 2005. hlm.1-7

<sup>9</sup> Penjelasan IX : *UPK*", *Penyaluran dana dan Administrasi Kegiatan PPK*" Jakarta, Th,2002, hlm.1

merupakan lembaga pengendali kegiatan penanggulangan kemiskinan di tingkat kecamatan yang bersangkutan, yang posisinya di luar institusi pemerintah, militer, agama, pekerjaan dan keluarga.

Menindak lanjuti kegiatan PPK di Kecamatan Kaloran kabupaten Temanggung, pada tanggal 23 Oktober 2003 bertempat di Kecamatan Kaloran diselenggarakan rapat warga dengan agenda pembentukan UPK. Dalam acara tersebut dihadiri sebanyak 106 tamu undangan, yang mewakili dari masing-masing desa yang antara lain terdiri dari beberapa kepala desa di Kecamatan Kaloran dan Penanggung Jawab Operasional Kecamatan (PJOK) sebagai peninjau dan instansi terkait serta Fasilitator Kecamatan (FK) PPK, ketua RW / ketua RT dan utusan Kelompok Swadaya Masyarakat yang telah terbentuk sebelumnya<sup>10</sup>.

Dalam rapat tersebut telah disepakati bersama susunan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Adapun kepengurusan UPK hingga sekarang ini adalah sebagai berikut:

Ketua : Ismail, S.Ag  
 Sekretaris : Sugiyati  
 Bendahara : Sriyamah  
 Korlap : Budi. H.<sup>11</sup>

## 2. Tujuan di bentuknya UPK

Karena UPK di bentuk demi kepentingan Oprasional PPK maka secara umum tujuan keberadaan UPK adalah Mempercepat penanggulangan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Ismail. Op Cit. jam. 0900, tgl 23 Nopember 2007

<sup>11</sup> Profil dokumen UPK Kecamatan Kaloran, Jumat, Tgl. 23 Nopember 2007

kemiskinan berdasarkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintahan lokal serta penyediaan pendanaan kebutuhan sosial dasar dan ekonomi.<sup>12</sup>

### 3. Visi dan Misi UPK

#### Visi

- a. UPK Kecamatan Kaloran adalah terwujudnya pelestarian dan pengembangan kegiatan PPK dengan sistem pembangunan partisipatif.

#### Misi

- a. Melestarikan kelembagaan dan kegiatan yang telah dilakukan PPK sesuai prinsip PPK.
- b. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat pemerintah desa serta kecamatan dalam memfasilitasi sistem pembangunan partisipatif yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat
- c. Pengembangan kemitraan dan pembangunan.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar masyarakat.
- e. Mewujudkan sistem penganggaran pemerintah daerah yang memungkinkan tersedianya alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan atau bantuan pihak ketiga yang bisa diorganisir antar desa dan atau setingkat kecamatan.

---

<sup>12</sup> Petunjuk teknis Oprasional PPK, Loc.cit.



- f. Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan dana pendukung usaha masyarakat miskin yang berperspektif pemberdayaan masyarakat.<sup>13</sup>

#### 4. Hasil-hasil Yang Telah Dicapai UPK

- a) Memberi bantuan Sarana dan Prasarana masyarakat antara lain adalah Perbaikan pasar hewan di desa Tepusen, perbaikan jalan tlasah di desa Kaloran, Tleter, Gandulan, Geblok, Tegowanuh, Keblukan, Getas, Kalimanggis dan pembuatan Jembatan dan Talud jalan di desa Tempuran dan Kemiri.
- b) Dalam pengelolaan kegiatannya, UPK juga memberikan bantuan kepada masyarakat dalam sektor pendidikan yang berupa pembangunan gedung sekolah Taman pendidikan kanak-kanak (TK) di desa Kwarakan, pendidikan anak miskin 99 anak, per anak 90.000.<sup>14</sup>
- c) Pengadaan sarana kesehatan yang meliputi: Pembuatan tandon air bersih di desa Tlogowungu, Pembuatan MCK di desa Gandon, dan pengadaan Posyandu yang terlaksana di desa-desa, seperti desa Tleter, Gandulan, Tlogowungu, dan Gandon, dan UPK juga telah memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin sebanyak 59 orang dengan nominal per orang Rp. 83,650 rupiah, Serta meningkatkan kemandirian pengusaha yang produktif, dalam bentuk penyaluran dana pinjaman.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Loc.cit

<sup>14</sup> Agung Pulunggono "Buku Laporan Kolektif Fasilitator Kecamatan" bulan Nopember 2007

<sup>15</sup> Ibid

Dan UPK ini diakui sebagai lembaga milik masyarakat dan mendapat dukungan dari masyarakat, lebih mengakar dan kuat komitmennya terhadap segi nilai azaz/ prinsip/ PPK terutama partisipasi dan transparansi dan akuntabilitas. Dalam pemberdayaan penanggulangan kemiskinan di daerahnya (wilayahnya), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) bisa melaksanakan program PPK yang berpihak pada masyarakat miskin dengan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan.

### **C. Mekanisme Hutang-Piutang di UPK**

Beberapa mekanisme hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan adalah meliputi sebagai berikut :

1. Gambaran umum Pelayanan pinjaman Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada para anggotanya diantaranya :
  - a. Badan Pengurus (Unit Pengelola Kegiatan) berusaha memberikan pinjaman sesuai pengajuan usulan pinjaman anggota (nasabah) yang sudah melewati rapat verifikasi secara tepat guna mencakup pada prinsip 3 K (karakter peminjam, kapasitas produksi, kemampuan membayar).
  - b. Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam tempo 1 tahun berikut Biaya Jasa Administrasi sebesar 1.5 % per-bulan
  - c. Bagi para peminjam yang akan melakukan pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dipermudah pinjamannya tanpa disertai jaminan yang memadai.

- d. Bersedia menerapkan tata tertib pinjaman nasabah, terutama dalam penanganan angsuran pinjaman harus sesuai dengan perjanjian pembayaran angsuran.

Secara umum pelaksanaan Hutang-Piutang Di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Kaloran ini adalah melalui beberapa proses yaitu mulai dari pengajuan pinjaman sesuai dengan usulan pinjaman para anggota (nasabah) yang sudah melewati rapat verifikasi untuk membantu pengembangan dan modal usahanya, serta pengembalian hutangnya. Dan besarnya pengajuan hutang yang diajukan juga tidak bisa ditentukan oleh pihak yang berhutang (nasabah) akan tetapi ditentukan oleh Unit Pengelola Kegiatan, pengajuan hutang di Unit Pengelola Kegiatan ini juga tidak bisa sendiri-sendiri, dari para anggota yang akan berhutang harus secara kelompok atau secara bersama dalam pengajuan hutangnya dengan batas minimal anggota 5 sampai 6 orang dan batas maksimal tidak ditentukan. Seperti apa yang telah di katakan oleh Bpk. Ismail Sebagai ketua UPK, Jadi dalam pengajuan hutang tidak bisa hanya seorang melainkan harus berkelompok, ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kemacetan dalam pembayaran hutang dan selain itu juga tercipta adanya rasa tanggung jawab bersama pada kelompoknya karena bila salah satu anggota kelompoknya ada yang belum melunasi hutangnya maka apabila akan

mengajukan pinjaman lagi sebelum pinjaman anggota yang lain selesai maka tidak bisa mengajukan pinjaman lagi.<sup>16</sup>

Berikut ini adalah tata cara mengajukan hutang di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Kaloran, diantaranya yaitu :

- a. Mengajukan permohonan untuk peminjaman uang di UPK
- b. Mengisi formulir pengajuan UPK.
- c. Bagi yang ingin mengajukan hutang di UPK, harus sudah mempunyai anggota dengan jumlah anggota minimal 5 orang dan diprioritaskan warga sekitar Kecamatan Kaloran.
- d. Melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- e. Untuk batas waktu pelunasan hutang adalah satu tahun.
- f. Untuk pelunasan hutang dikenakan biaya Jasa Administrasi 1,5 % perbulan
- g. Besar pinjaman untuk Simpan Pinjam Perempuan sebesar Rp. 10 juta sampai dengan Rp.20 juta untuk Usaha Ekonomi Produktif dengan kriteria peminjam yang telah ditentukan oleh Pengurus UPK.<sup>17</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa demi kelancaran peminjaman dana bergulir PPK, UPK menerapkan aturan khusus yang disebut dengan istilah *Tanggung Renteng* sesuai dengan kesepakatan Musawarah Antar Desa (MAD). Menurut bapak Ismail selaku ketua UPK menjelaskan bahwa Tanggung renteng merupakan sebuah sistem

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ibu Sriyama selaku Bendahara UPK pada hari Selasa, jam. 11.00 tanggal 11 Desember 2007

<sup>17</sup> Wawancara dengan Sugiyati sebagai Sekretaris UPK pada hari Selasa, jam.09.20 tanggal 11 Desember 2007 "penjelasan lebih lanjut dalam lampiran syarat pengajuan pinjaman"

penangungan utang dengan cara tanggung bersama yang diterapkan kepada kelompok penghutang, jadi setiap kelompok yang mengajukan pinjaman akan mendapatkan surat pernyataan tanggung renteng yang di dalamnya menyatakan kesanggupan dari tiap-tiap anggota kelompok untuk menanggung bersama pinjaman yang diberikan oleh UPK, dan apabila dalam pembayaran ada dari salah satu anggota yang menunggak dan tidak memiliki jaminan maka setiap anggota kelompok diwajibkan untuk membayar sama banyaknya atas sisa kewajiban tersebut.

Dengan adanya sistem Tanggung renteng yang diterapkan oleh UPK dimaksudkan untuk menghindari adanya kemacetan dan memperkuat adanya tanggung jawab bersama dalam kelompok, agar dalam pengajuan pinjaman yang selanjutnya mendapatkan kemudahan. Karena bila salah satu anggota kelompoknya ada yang belum melunasi hutangnya maka apabila mengajukan pinjaman lagi tidak bisa sebelum pinjaman yang lain dilunasi.<sup>18</sup>

Dan bahkan hal tersebut akan mempengaruhi tertundanya perguliran pinjaman kepada kelompok lain yang masih dalam satu desa, sebagai mana yang dijelaskan dalam buku laporan tahunan UPK, kecamatan Kaloran kabupaten Temanggung tahun 2005 yang menyebutkan bahwa " apabila disatu desa masih ada kelompok yang

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan bapak Ismail selaku ketua UPK, pada hari Selasa, jam. 10.20 tanggal 23 November 2007

menunggak maka perguliran pada kelompok desa tersebut di tunda sampai kelompok peminjam tersebut dapat melunasi tunggakan ke UPK " <sup>19</sup>

Sesuai dengan kondisi warga di sekitar Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung ini yang dipandang belum bisa mengembangkan potensi wilayahnya sehingga banyak warga yang kurang bisa memanfaatkan kondisi ini. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor diantaranya kondisi perekonomian yang belum mencukupi untuk mengembangkan produksinya, sarana maupun prasarana yang belum memadai, dan kemampuan setiap individu atau pelaku yang pada hal ini yaitu masyarakat di wilayah Kecamatan Kaloran. Beberapa pertimbangan hal di atas kemudian warga masyarakat Kecamatan mengambil inisiatif untuk mengajukan hutang di Unit Pengelola Kegiatan, dengan berbagai pertimbangan dan beberapa macam alasan yang dikemukakan.

Dengan adanya Unit Pengelola Kegiatan dengan dana bergulirnya yang menggunakan sistem *Tanggung Renteng* sebenarnya banyak angsuran atau pengembalian hutang yang macet, sampai dengan 2 sampai 3 bulan namun kemacetan tersebut tidak di rasakan oleh pihak UPK karena kemacetan itu ada didalam kelompok peminjam, Karena pada awal pengajuan hutang pihak kelompok telah menanda tangani surat persetujuan *Tanggung Renteng* kepada UPK maka ketika ada penunggakan dalam salah satu anggota maka kelompoklah yang harus menanggung tunggakan tersebut, namun beda halnya dengan yang

---

<sup>19</sup> Laporan tahunan Unit Pengelola Kegiatan tahun 2005

dikatakan Ibu Ninik sebagai ketua kelompok peminjam dari desa Gandon dengan adanya system *Tanggung Renteng* malah semua beban yang ditanggung oleh anggota yaitu membayar angsuran perbulan ketika dari anggota ada yang menunggak maka semua tanggung jawab diserahkan kepada ketua, bukannya ditanggung bersama dengan anggota-anggota dan dalam hal ini ketualah yang harus menanggung tunggakan anggota yang macet beserta biaya jasanya sehingga ketua harus menanggung dua kali lipat dari tunggakan yang harus dibayar ke UPK, dan bahkan bagi anggota yang mengetahui bahwa kewajibannya udah ditanggung kebanyakan merasa bebas dengan kewajibannya yaitu membayar hutang.<sup>20</sup> Dan ini menjadi masalah yang cukup sulit bagi UPK sendiri untuk menyelesaikannya karena pada waktu proses pengajuan hutang tersebut tidak ada jaminan berupa apapun, sehingga pada waktu jatuh tempo pelunasan hutang, banyak warga yang belum sanggup melunasi hutangnya seperti yang dialami oleh salah satu nasabah dari Kelompok Menur yaitu Bpk. Sumpeno, menurutnya dia tidak sanggup membayar hutangnya pada jatuh tempo karena belum punya uang sehingga dia mengalami tunggakan pembayaran hutangnya, dan hal ini diperkuat lagi dengan hasil wawancara dengan pengurus UPK yang menangani pengucuran dana. Seperti yang telah dikatakan pengurus bagian administrasi yaitu, Ibu Sugiyati. Menurutnya pihak *muqtaridh* (orang yang berhutang) ketika tidak dapat membayar hutangnya akan menjadi penghambat perputaran uang,

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ibu Ninik selaku ketua Kelompok Menur dari desa Gandon pada hari sabtu, jam. 09.00 WIB. Tanggal 15 Desember 2007.

walaupun pada awalnya pihak UPK sendiri pun sudah melakukan rapat verifikasi agar mencakup karakter peminjam, kapasitas produksi, kemampuan membayar. Akan tetapi karena dalam proses pengajuan hutangnya dari pihak Unit Pengelola kegiatan sendiri pun tidak meminta jaminan, dan itu merupakan konsekwensi dari UPK itu sendiri, sehingga pihak *muqtaridh* bisa seenaknya saja kalau mau melunasi hutangnya. Dan menurutnya sampai tahun 2007 saat ini jumlah nasabah atau anggota Kelompok peminjam mencapai 104 kelompok, dari data yang sudah masuk 20 % dari anggota peminjam itu banyak yang mengalami macet,<sup>21</sup> dengan alasan belum mempunyai uang untuk melunasi hutangnya dan apabila dari pihak Unit Pengelola Kegiatan lewat juru tagihnya tidak bisa menangani masalah penunggakan yang ada pada tiap-tiap kelompok maka oleh Unit Pengelola Kegiatan akan dilimpahkan kepada FK (Fasilitator Kecamatan) melalui FD (Fasilitator Desa).<sup>22</sup>

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat mengumpulkan data mengenai motivasi warga masyarakat yang mengajukan hutang dalam rangka mengembangkan usaha yang dimilikinya, diantara motivasi para warga adalah sebagai berikut :

Menurut Ibu Umiyah warga desa Tlogowungu salah satu anggota peminjam dari kelompok gentan menjelaskan bahwa hal-hal yang mendorong dia untuk mengajukan hutang adalah karena pendapatan dari hasil berjualan dipasar menurun disebabkan sedikitnya pembeli

---

<sup>21</sup> Laporan kolektif pinjaman UPK, 30 Nopember Op.cit 29

<sup>22</sup> Penjelasan VIII "Prosedur Penanganan dan Pengaduan Masalah" Jakarta. 2005. hlm.6



dikarenakan jumlah barang dagangan yang sudah kadaluwarsa dan sedikit.<sup>23</sup>

Berbeda halnya dengan alasan yang diberikan oleh salah satu nasabah UPK yaitu Bpk Suwadi pada hari sabtu jam 14.20 WIB tanggal 15 desember 2007 ini adalah ayah dari 4 orang anak warga desa Gandon yang mana anak yang pertama perempuan duduk dikelas II SLTP, dan yang kedua dan ketiga duduk dibangku sekolah dasar dan yang satunya masih balita dia menuturkan bahwa alasan yang mendorongnya untuk mengajukan hutang adalah selain aksesnya mudah juga karena dengan kebutuhan untuk mencukupi keluarga yang semakin banyak, sedangkan usaha yang dia jalankan yaitu membuat batu bata sudah tidak bisa diharapkan lagi dikarenakan kontrak penyewaan tanah nya sudah habis.<sup>24</sup>

Adapun menurut penuturan Ibu Sukiah warga desa Tegowanuh pada hari sabtu tanggal 15 desember 2007 jam 13.00, bahwa motivasi untuk mengajukan hutang di UPK yaitu karena aksesnya sangat mudah dibanding bank, dan juga karena dengan adanya kebutuhan untuk memajukan usahanya yang kurang modal yaitu guna biaya pembelian barang-barang toko yang semakin tinggi, sehingga ketika barang-barang naik dia mau tidak mau dia harus menyediakan barang barang baru tersebut agar pemasarannya lebih cepat dan mudah laku, maka harus mengajukan hutang untuk menambah persediaan tokonya.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ibu Umiyah Sebagai anggota Kelompok peminjam warga desa Tlogowungu pada hari sabtu jam. 10.20 WIB, tanggal 15 Desember 2007

<sup>24</sup> Wawancara dengan bapak Suwadi Sebagai anggota kelompok peminjam warga desa Gandon pada hari sabtu, jam. 11.20 WIB, tanggal 15 Desember 2007

Seperti pengakuan salah satu warga yang berhutang di Unit Pengelola Kegiatan ini, untuk pengembangan sarana usahanya salah seorang warga yang mempunyai usaha pertanian cabe, ini harus mengajukan hutang di Unit Pengelola Kegiatan untuk menambah modal usahanya, karena pada awalnya dengan modal yang sedikit maka tidak cukup untuk pengembangan usaha pertaniannya tersebut.

Berikut perincian dalam usaha pembuatan batu bata yang akan dia jalankan:

- a. biaya penambahan bibit cabe 1 bungkus seharga Rp. 75.000
- b. Biaya untuk pengolahan tanah yang dikerjakan oleh 6 orang buruh tani sebesar Rp. 225.000
- c. Biaya untuk pembelian plastic 4 rol @ Rp.350.000 x 4 : Rp. 1.400.000
- d. Biaya lain-lain sebesar Rp. 300.000

Dengan demikian biaya yang diajukan oleh Ibu Endang S, untuk pengembangan Usaha taninya sebesar Rp. 2.000.000

Dari beberapa alasan diatas mereka mengajukan pinjaman kepada Unit Pengelola Kegiatan dengan tujuan agar nantinya sebagai modal untuk mengembangkan usahanya, yang nantinya keuntungan dari usaha tersebut dapat untuk menghidupi segala kebutuhan keluarga.

Seperti apa yang dialami oleh Ibu Mariyatun ini Ibu dari dua orang anak ini telah menjalankan usahanya yaitu pembuatan batu bata, dan untuk mengembangkan usahanya maka dia mengajukan pinjaman di Unit

Pengelola Kegiatan dengan rincian anggaran yang dibutuhkan sebagai berikut:

Biaya untuk pembelian tanah sistem kontrak selama 1-2 tahun sebesar Rp.2.000.000

Biaya untuk pembelian kayu bakar selama 1 kali bakar 1 kali panen sebesar Rp. 750.000

Biaya lain-lain sebesar Rp 500.000

Harga penjualan batu bata @ Rp. 250

Dengan demikian biaya untuk pengelolaan usaha batu bata Ibu Mariatun selama satu musim atau satu kali panen sebesar Rp 3.250.000

Jika kita kalkulasi bahwa setiap 1 kali pembakaran selama 1-2 bulan menghasilkan batu bata maksimal 30.000 batu bata, maka hasil penjualan selama 1 kali panen yang didapatkan Ibu Mariatun adalah sebesar Rp.7.500.000.<sup>25</sup>

Dengan beberapa alasan di atas mereka mengajukan pinjaman kepada Unit Pengelola Kegiatan dengan tujuan agar nantinya sebagai modal untuk menciptakan lapangan usaha, yang nantinya keuntungan dari usaha tersebut dapat untuk menghidupi segala kebutuhan keluarga sehari-hari dan nantinya juga dapat dengan segera mengembalikan hutang.

Dengan demikian seorang warga yang mengajukan hutang di Unit Pengelola Kegiatan mempunyai dua kemungkinan, yaitu: *pertama*: Ingin menciptakan lapangan usaha yang produktif sehingga dengan hasil yang

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ibu Mariatun Anggota peminjam UPK warga Desa Tegowanuh pada hari sabtu, jam 13.45 WIB, tanggal 15 Desember 2007

diperoleh tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan untuk mengembalikan hutang. *kedua*, mengembangkan lapangan usaha yang sudah ada sehingga nantinya diharapkan dapat bersaing untuk mencari konsumen. *Ketiga*, meneruskan usaha yang sudah berjalan dan mengembangkannya menjadi lebih baik dan berkembang sehingga bisa menghasilkan hasil produksi atau keuntungan usaha yang lebih besar.

Jadi berangkat dari motivasi masyarakat yang begitu berbeda-beda dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan yakni masih besarnya respon masyarakat sekitar terhadap keberadaan Unit Pengelola Kegiatan ini dengan berbagai alasan yang sudah di jelaskan diatas sebelumnya.

#### **D. Sistem Pengelolaan Hutang-Piutang di UPK**

Pengelolaan hutang / pinjaman kepada masyarakat yang dilakukan oleh UPK berupa perguliran kelompok peminjam baik SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) maupun UEP (Usaha Ekonomi Produktif), dan dalam pengelolaan pinjaman bergulir tersebut pihak UPK menerapkan peraturan khusus sesuai dengan kesepakatan Musyawarah Antar Desa yang menyebutkan bahwa "apabila disatu desa masih ada kelompok yang menunggak maka perputaran perguliran pada kelompok desa tersebut ditunda sampai kelompok peminjam tersebut dapat melunasi tunggakan kepada UPK.

Dalam mensikapi peraturan tersebut, maka UPK mengambil kebijakan dengan mengeluarkan tata aturan perguliran yang juga telah disepakati oleh Musyawarah Antar Desa, yang mana dalam aturan perguliran tersebut dengan

tegas disebutkan bahwa " bagi kelompok penunggak akan kehilangan 3 hak yaitu :

1. Kelompok tidak berhak mendapatkan Piagam Penghargaan dari UPK
2. Kelompok tidak berhak mendapatkan Kartu anggota UPK
3. Kelompok tidak berhak mendapatkan IPTW.<sup>26</sup>

Adapun sistem pengelolaan hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan dalam beberapa hal yang mengatur tentang bagaimana prosentase pembagian keuntungan telah diatur dan ditetapkan berdasarkan dari hasil rapat pengurus Unit Pengelola Kegiatan dengan ketentuan pemanfaatan pembagian menggunakan mekanisme prosentase (%), yaitu sebagai berikut:

1. Untuk penambahan modal minimal 50 %.
2. Untuk pengembangan kelembagaan kelompok maksimal 10 %.
3. Bonus pengurus UPK maksimal 5 %.
4. Dan dana sosial untuk masyarakat miskin minimal 10 %.<sup>27</sup>

Namun sebelum sistem pembagian keuntungan hasil pendapatan Biaya Jasa Administrasi dibagikan ada beberapa potongan biaya-biaya yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Biaya operasional badan pengurus UPK.
2. Biaya non operasional
3. Honorarium pendampingan pengurus
4. Subsidi UPK kepada Kelompok peminjam .

---

<sup>26</sup> Laporan Tutup buku UPK. *Op.cit*

<sup>27</sup> Penjelasan X "pengelolaan dana bergulir" jakarta.2005, hlm.8

Untuk biaya-biaya diatas ada beberapa poin yang lebih menguntungkan bagi pihak *Muqtaridh* karena Unit Pengelola Kegiatan masih mengeluarkan bantuan atau subsidi kepada Kelompok hal ini bertujuan agar masing-masing Kelompok peminjam pada akhirnya bisa mempunyai kas yang nantinya untuk mereka sendiri dan ini secara otomatis mengurangi jumlah angsuran mereka seperti pengakuan dari salah satu anggota kelompok peminjam dari kelompok Gentan yaitu Ibu Endang, pada tanggal 14.30 tanggal 15 desember 2007.

Untuk pengelolaan hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan tidak menguntungkan pihak UPK saja, ini dibuktikan dengan adanya program-program sosial yang sampai saat ini masih berjalan, diantaranya, yaitu pemberian beasiswa kepada anak-anak sekolah dasar yang mempunyai prestasi baik, hal ini agar Unit Pengelola Kegiatan yang sejarah didirikannya untuk membantu orang-orang yang tidak mampu menjadikan UPK ini milik masyarakat, dan kembali pada masyarakat. Menurut Bpk Ismail Sag, sebagai koordinator Unit Pengelola Kegiatan mengatakan bahwa pada prinsipnya keuntungan yang telah diperoleh Unit Pengelola Kegiatan tidak semuanya di tampung atau dimiliki oleh UPK itu sendiri, akan tetapi keuntungan itu oleh Unit Pengelola Kegiatan juga dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Diantaranya seperti yang telah dijelaskan secara rinci diatas. Dan pada prinsipnya Unit Pengelola Kegiatan ini didirikan sebagai bentuk tolong-menolong bagi warga masyarakat yang membutuhkan karena sesuai dengan salah satu tujuannya yaitu untuk menjalankan program pengentasan

kemiskinan Pedesaan yang melanda di Indonesia sekitar tahun 1997. Sedangkan menurut Bapak Ismail menjelaskan bahwa untuk dana bergulir PPK, pemakaiannya dikenakan bunga 1,5 % Per bulan. Bunga itu menurutnya tidak dimaksudkan untuk membebani masyarakat, melainkan untuk mempertahankan nilai riil dana tersebut. Dari bunga atau uang jasa tersebut dimaksudkan sebagai kompensasi Inflasi, dan sebagai biaya operasional.

Akan tetapi pada kenyataannya proses pengembalian angsuran tidak bisa berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan adanya beberapa orang dari anggota Kelompok peminjam yang mengalami kemacetan karena tidak membayar angsuran dan hal ini disatu sisi juga menghambat perkembangan dan perputaran dana yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan tersebut. Untuk mengatasi hal ini maka pihak Juru tagih dari UPK yang mesti harus meminta satu persatu kepada anggota kelompok yang mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran.

Dan ternyata seperti apa yang telah disampaikan oleh juru tagihnya yaitu Bp. Budi pada waktu melakukan penarikan kepada anggota yang mengalami tunggakan ternyata masih ada juga yang belum bisa membayar dengan alasan belum mempunyai uang.

Unit Pengelola Kegiatan yang dalam pelayanan terhadap nasabahnya juga memberikan penghargaan bagi kelompok peminjam yang tiap-tiap anggotanya tidak pernah mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran hutangnya berupa program unggulan, salah satu keuntungannya yaitu apabila kelompok unggulan ini mengajukan permohonan hutang lagi maka oleh

pengurus Unit Pengelola Kegiatan akan diprioritaskan dari calon kelompok peminjam lainnya lain.

Berdasarkan data-data yang penulis kemukakan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa :

1. Sistem pembagian keuntungan atau pendapatan biaya jasa administrasi yang telah berjalan adalah keuntungan bersih, dikurangi biaya-biaya, baik biaya operasional maupun biaya non operasional.
2. Dalam proses pelunasan hutangnya ternyata praktek di lapangan banyak mengalami kemacetan sehingga mengganggu sirkulasi keuangan UPK, hal ini terjadi karena dari sistem yang sudah berjalan tidak ada jaminan berupa apapun sehingga masyarakat yang mempunyai hutang seenaknya saja ketika akan membayar dikarenakan tidak adanya ikatan dengan pihak Unit Pengelola Kegiatan.



## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PELAKSANAAN HUTANG-PIUTANG DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) KEC. KALORAN KAB. TEMANGGUNG**

#### **A. Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan 1,5% dalam Hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kec. Kaloran Kab, Temanggung**

Hukum Islam pada hakekatnya diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umat, yang mana didalamnya memberi kemanfaatan dan menghindari *kemafsadatan* bagi umat manusia, berkaitan dengan hukum Allah yang diantaranya adalah mengatur tentang *muamalah* dan dalam hal ini adalah hutang-piutang sebagai mana yang telah berjalan di sebuah lembaga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.

Lazimnya bentuk hutang-piutang yang terjadi, bagi para *muqtaridh* (orang yang berhutang) mengajukan hutang atau pinjaman ke sebuah lembaga masyarakat yang menangani pinjaman. Demikian pula yang terjadi di kecamatan Kaloran kabupaten Temanggung, Pinjaman yang diajukan oleh para calon *muqtaridh* seperti yang telah penulis jelaskan di bab sebelumnya, yaitu meliputi peminjam yang akan mengajukan hutangnya sehingga menerima sesuai dengan jumlah yang diajukan yang sudah melalui proses pengajuan. Pelaksanaan hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah melalui beberapa proses yaitu mulai dari pengajuan pinjaman sesuai dengan usulan pinjaman anggota (*muqtaridh*) yang sudah melewati rapat

verifikasi, untuk proses pengajuan hutang di UPK juga tidak bisa sendiri-sendiri, melainkan harus dari anggota-anggota atau secara berkelompok.

Setelah kelompok lolos dari verifikasi selanjutnya akan terjadi kesepakatan atau *aqad* antara *muqtaridh* dengan pihak UPK atau disebut *muqridh* mengenai pelaksanaan pembayaran dan pelunasan hutangnya, dan dari pihak *muqtaridh* harus bersedia melunasi dengan biaya tambahan jasa administrasi sebagai mana yang ditentukan oleh *muqridh* yaitu UPK, sebesar 1,5% per bulan. Dalam hal ini maka penulis akan melakukan analisis tentang adanya tambahan dalam pengembalian hutang tersebut, berdasarkan beberapa pendapat yang akan penulis sampaikan, apakah tambahan yang dipungut atau diterima *muqridh* termasuk riba (haram) atau bukan.

Apabila kita melihat praktek hutang-piutang yang terjadi di Unit Pengelola Kegiatan bahwa pada saat mengajukan hutang maka yang perlu diperhatikan adalah ketika dalam angsuran atau pembayaran dikenakan biaya jasa administrasi sebesar 1,5 % per bulan, dan hal ini terjadi atas kesepakatan antara *muqtaridh* dengan *muqridh*, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Maryatun salah seorang *muqtaridh*, bahwa untuk mengembangkan usaha pembuatan batu batanya maka dia mengajukan hutang kepada Unit Pengelola Kegiatan sebesar Rp. 2.000.000 dengan bunganya sebesar 1,5% per bulan yaitu Rp. 30.000 dengan waktu yang disepakati maksimal satu tahun, jadi selama satu tahun Ibu Maryatun harus membayar bunga sebesar Rp. 360.000 sampai dia dapat melunasi hutangnya meskipun waktunya lebih dari satu tahun.

Sedangkan kalau kita menganalisis dari segi kelebihan dalam jumlah pembayaran maka hal itu bisa dikatakan riba. Sementara para ahli hukum mengemukakan dalam sebuah kaidah, bahkan ada yang menilainya hadits walau pada hakekatnya ia adalah hadits *dha'if*, bahwa;

"(كل قرض جر منفعة فهو حرام)"

“Setiap piutang yang mengundang manfaat (melebihi jumlah hutang), maka itu adalah haram (riba yang terlarang).”

Pandangan atau kaidah diatas menurut Quraish Shihab tidak sepenuhnya benar, karena Nabi Muhammad Saw pernah membenarkan pembayaran yang melebihi apa yang dipinjam.<sup>1</sup>

Sebagaimana praktek hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, dengan adanya tambahan dalam pembayaran yaitu bunga Sebesar 1,5 % per bulan sebagai jasa pengembalian hutang. Namun perlu kita ketahui dalam penggunaan jasa pinjaman tersebut, karena jasa pinjaman itu bukan untuk mencari keuntungan semata melainkan manfaatnya untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Kaloran itu sendiri. Jika jasa pinjaman itu dianggap riba, maka seluruh fuqoha sepakat bahwasanya hukum riba adalah haram.<sup>2</sup> Namun pendapat lainnya mengatakan bahwa larangan riba dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan adanya eksploitasi, yang secara ekonomi menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat.

---

<sup>1</sup> Quraish Shihab " *Tafsir Al-Misbah*" Volume I, Jakarta: Laentera Hati, Cet.ke-V, 2005, hlm.591.

<sup>2</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 151

Dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 sebagaimana dalam bab sebelumnya juga disebutkan bahwa Allah telah melarang riba dan menghalalkan jual beli, namun para periba pada zaman Rasulullah menolak pengharaman riba dan mereka mengatakan seperti yang Allah nyatakan dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 tersebut. Adanya keraguan mereka tentang riba seperti mereka katakan: "Perdagangan juga mengambil keuntungan dan faedah, begitu juga riba mengambil keuntungan dan faedah. Tetapi analogi semacam ini sangatlah lemah, sebab tindakan perdagangan boleh jadi mendapat untung dan boleh jadi rugi, sedangkan tindakan riba selamanya telah menentukan keuntungan. Inilah perbedaan yang hakiki antara ketentuan halalnya dagang dan haramnya riba.<sup>3</sup>

Menurut Muhammad Abduh (w. 1905) dan muridnya, Muhammad Rashid Ridha, ketika menjelaskan bentuk riba yang dilarang pada masa pra-Islam, mereka menegaskan bahwa riba pada masa pra-Islam dipraktekkan dalam bentuk tambahan pembayaran yang diminta dari pinjaman yang telah melewati batas tempo pembayaran, sehingga mengalami penangguhan yang menyebabkan meningkatnya pembayaran hutang tersebut.<sup>4</sup>

Berdasarkan pandangan Abduh dan Rashid Ridha serta Ibn Qayyim, Abd al- Razzaq Sanhuri yang merupakan pakar hukum Islam kebangsaan Mesir, menegaskan bahwa bunga yang dilarang adalah yang berlipat ganda, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran ayat 130 sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Abu Sura'I Abdul Hadi, *"Bunga Bank Dalam Islam"* Surabaya, Al-Ikhlash, th 1993. hlm.22

<sup>4</sup> Dalam Abdullah Saeed *"Bank Islam dan Bunga"*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cet-2, 2004, hlm. 75

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

عمران ١٣٠ ﴿﴾

Artinya: “hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.” (Q.S. Ali-Imran : 130).<sup>5</sup>

Keterangan ini berdasarkan bukti faktual dalam praktek riba pada masa pra-Islam dan juga implikasi yang ditimbulkannya sehingga menurut Sanhuri bunga yang tidak berlipat ganda tidaklah dilarang.<sup>6</sup>

Muhammad Hatta dalam suatu tulisannya yang berjudul "Islam dan Rente" dengan jelas menjelaskan perbedaan antara riba dan *rente*, menurutnya mengapa riba dilarang, yaitu karena dalam perbuatan itu telah menyebabkan kesengsaraan orang yang lagi mengalami kesulitan. Riba adalah tambahan atas hutang yang dipakai untuk konsumsi. Sedangkan *rente* atau bunga, adalah balas jasa atas pinjaman yang digunakan untuk kepentingan produksi.<sup>7</sup>

Sementara Quraissy Syihab (tokoh *mufassir* Indonesia) setelah menganalisis banyak hal yang berkaitan dengan ayat-ayat riba menyimpulkan *illat* keharaman riba menurut dia adalah *al-Dzulm* (aniaya), sebagai mana tersirat dalam surat Al-Baqarah ayat 279. Menurutny yang diharamkan adalah bunga atau tambahan yang dipungut secara *dzulm* (penindasan dan pemerasan) tidak semua bunga.<sup>8</sup>

Demikian halnya, menurut pendapat yang di ungkapkan Imam Akbar Syekh Mahmud Syaltut dalam sebuah pendapatnya bahwa "pinjaman

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op.cit, hlm. 84

<sup>6</sup> Sanhuri dalam Abdullah Saeed, " *Bank Islam dan Bunga*" Op, Cit. hlm.76

<sup>7</sup> Hatta, dalam Muhammad " *Manajemem Bank Syari'ah*" Yogyakarta,UPP, tth, hlm.57.

<sup>8</sup> Ghutron A. Mas'adi, M.Ag. *Op.Cit* hlm. 166

berbunga dibolehkan bila sangat dibutuhkan"<sup>9</sup> fatwa ini muncul tatkala beliau ditanya tentang kredit yang berbunga dan kredit suatu negara dari negara lain atau perseorangan.

Majelis tarjih Muhammadiyah dalam Muktamarnya di Sidoarjo tahun 1968 menyatakan bahwa bunga yang diberikan oleh bank-bank milik Negara kepada para nasabahnya, demikian pula sebaliknya termasuk perkara *mutasyabihat*.<sup>10</sup> Maksudnya adalah bunga bank milik Negara itu masih belum diperoleh kejelasan hukumnya dan merupakan tambahan dari pinjaman pokok yang diisyaratkan dalam perjanjian kredit meskipun tambahan itu tidak terlalu besar. Tapi disisi lain bunga yang relative kecil bukan menjadi keuntungan milik perseorangan, melainkan menjadi milik Negara yang akan dipergunakan untuk kepentingan orang banyak.

Sedangkan pendapat NU mengenai bunga dapat dilihat dalam keputusan sidang *Lajnah Bahtsul Masail*. Dari berbagai sidang *Lajnah Bahtsul Masail*, bunga hampir sama dengan gadai. Nahdlatul Ulama' (NU) dalam Munas Ulama' di Bandar Lampung pada tahun 1992 menetapkan tiga aspirasi yang berkembang dikalangan ulama' mengenai hukum bunga :

1. Hukumnya haram berdasarkan *Qiyas* terhadap riba.
2. Hukumnya halal berdasarkan *al-maslahah*.
3. Subhat.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Karnaen Perwataatmadja, "Keistiqomahan Dalam Mengelola Bank Syari'ah" Kertas Kerja Seminar Bank shyari'ah, Yogyakarta.

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir, MA, "*Hukum Islam Tentang Riba Hutang-Piutang dan Gadai*", Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1983. hlm 31

<sup>11</sup> Aziz Masyuri, *Masalah Keagamaan Hasil Mu'tamar dan Munas Ulama' NU*, Surabaya : Dinamika press, 1997. hlm. 368-370

Jadi jika dilihat dari uraian beberapa pendapat di atas maka pinjaman Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, yang mana didalamnya terdapat bunga pengembalian sebesar 1,5 % per bulan adalah tidak termasuk dalam kategori riba yang dilarang, dengan kriteria tingkat bunga yang berlipat ganda karena tempo waktu penangguhan dalam pembayaran hutang.

Jadi jasa atau bunga pinjaman UPK sebesar 1,5 % per bulan adalah sebagai sesuatu yang sah dan diperbolehkan menurut hukum, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abd al-Razzaq Sanhuri bahwa riba tidak dapat dianggap sah menurut hukum kecuali dalam keadaan terpaksa (*dharuri*).<sup>12</sup> Hal ini tidak lepas dari sebuah kaidah fihiyyah yang berbunyi :

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya : “Madlarat itu dapat memperbolehkan yang dilarang.”<sup>13</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, jika kita melihat pada praktek hutang-piutang yang ada di UPK yang dalam pengembalian pembayarannya terdapat bunga atau jasa 1,5 % per bulan, yang pada dasarnya dalam penggunaan bunga tersebut oleh UPK digunakan atau dialokasikan untuk penghapusan kredit yang macet, untuk digulirkan bagi kelompok yang lain yang belum mendapat dana pinjaman, dan selain itu bunga atau jasa sebesar 1,5 % tersebut oleh UPK juga digunakan untuk kegiatan sosial yang bermanfaat untuk masyarakat atau nasabah yang tidak lain adalah masyarakat

<sup>12</sup> Sanhuri dalam Abdullah Saeed "Bank Islam Dan Bunga" Op.Cit, hlm. 77.

<sup>13</sup> Moh. Adib Bisri, "Risalah qawa-id fiqh" terj. Al-Faraidul Bahiyyah, Menara kudu, kudu, 1977. hlm. 21

Kecamatan Kaloran itu sendiri. Di samping itu pelaksanaan hutang-piutang yang terjadi di UPK tidak terdapat unsur paksaan, dan tambahan yang terdapat dalam pengembalian di UPK tidak termasuk tambahan yang tidak ada batasnya dan tidak terdapat pula syarat yang memberatkan sebagaimana yang di jelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 279, berkenaan dengan surat yang menjelaskan tentang batasan riba tersebut Quraissy syihab menjelaskan bahwa *illat* keharaman riba adalah *Dzulm* (aniaya atau penindasan), dan keberadaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dirasa banyak memberikan *masalah* bagi kelompok peminjam khususnya masyarakat Kecamatan Kaloran. Sehingga bunga atau jasa pinjaman sebesar 1,5 % yang ada di Unit Pengelola Kegiatan tidak termasuk riba dan boleh menurut hukum.

#### **B. Analisis Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pelaksanaan Hutang piutang di UPK Kec. Kaloran Kab. Temanggung**

Hutang-piutang dalam Islam dikenal dengan *Al-Qardh*, oleh karena itu Islam menggembirakan orang yang mampu agar mau memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya yang memerlukan. Memberi hutang kepada orang yang memang benar-benar memerlukan bernilai ibadah kepada Allah SWT, dan dalam waktu yang sama bernilai kemanusiaan yang tinggi. Dengan demikian hutang-piutang sebagaimana yang telah berjalan di Unit Pengelola Kegiatan yang dalam pelaksanaannya menggunakan sebuah aturan khusus sebagaimana yang telah dijelaskan diatas yaitu dengan istilah sistem Tanggung Renteng. Istilah *Tanggung Renteng* disini adalah merupakan sebuah system penanggungan utang dengan cara tanggung bersama yang



diterapkan kepada kelompok penghutang, yang mana setiap anggota kelompok yang mengajukan pinjaman akan menandatangani surat pernyataan *Tanggung Renteng* yang di dalamnya menyatakan kesanggupan dari tiap-tiap anggota kelompok untuk menanggung bersama pinjaman yang diberikan oleh UPK, dan apabila dalam pembayaran ada dari salah satu anggota yang menunggak dan tidak memiliki jaminan maka setiap anggota kelompok diwajibkan untuk membayar sama banyaknya atas sisa kewajiban tersebut.

Diskursus tentang sah atau tidak dan batal atau tidaknya sebuah akad dilihat dari ketentuan hukum Islam, entah itu termasuk haram dan halal dalam melakukan transaksi, sedang kaitannya dalam hutang-piutang dengan pertanggungan hutang ini terdapat kemungkinan dalam praktek tersebut bertentangan dengan hukum syara'.

Oleh karena itu dalam analisis ini penulis berusaha menganalisa praktek pertanggungan dalam hutang-piutang tersebut dengan melihat dari sisi rukun dan syarat sahnya pertanggungan hutang yang dalam UPK disebut dengan istilah *Tanggung Renteng*, apakah sudah terpenuhi atau belum semua persyaratan yang terdapat di dalamnya .

Setelah melihat penjabaran diatas tentang *Tanggung Renteng* maka penulis menyimpulkan bahwa sistem *Tanggung Renteng* yang dipakai Unit Pengelola Kegiatan Kec. Kaloran Kab. Temanggung dalam Istilah Fiqih disebut dengan *Dhaman* atau *kafalah*.

Madzhab Syafi'i menjelaskan bahwa *dhaman* menurut pengertian syara' ialah perjanjian yang menetapkan kesanggupan untuk menjamin hak

yang tetap dalam tanggungan orang lain. Dan sesuai dengan definisi tersebut maka perjanjian menjamin atau *dhaman*, ada berapa macam yang salah satunya yaitu tentang menjamin hutang, maksudnya ialah bahwa orang yang menjamin menyanggupi hak yang ada pada orang yang berhutang sehingga tanggungannya terkait dengannya, sebagaimana terkaitnya orang yang berhutang, yang mana bila salah satunya telah menyerahkan hak maka lepaslah tanggungan yang lain. Inilah yang dimaksudkan definisi "menjamin hak yang tetap."<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas menurut bapak H. Muhammad Najib selaku pengasuh Pon. Pes Ridhallah dan tokoh ulama' di kecamatan Kaloran, dan H. Kabul Turmudhi selaku MUI tingkat kecamatan bahwa, menurut beliau perjanjian *Tanggung Renteng* yang telah berjalan di Unit Pengelola Kegiatan adalah boleh menurut hukum, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama dalam kelompok, anggota-anggota kelompok dan UPK, yang tertulis dalam surat pernyataan kesanggupan dalam hal menanggung bersama hutang secara kolektif.

Jadi *Tanggung Renteng* yang diterapkan sebagai aturan dalam kelompok peminjam dalam Unit Pengelola Kegiatan menurut beliau hukumnya adalah boleh dan sah dilakukan, karena dalam istilah penanggungan hutang, yang dalam UPK disebut dengan *Tanggung Renteng*, dan dalam istilah fiqih disebut dengan kafalah tersebut semua persyaratan sudah terpenuhi seperti halnya: *Pertama*, adanya orang atau kelompok yang

---

<sup>14</sup> Abdulrahman Al-jaziri., Al-Fiqh Alal Madzahibil Arba'ah. Terj. Moh Zuhri, et al., "Fiqh Empat Madzhab", Jilid IV, Semarang; CV Asy Syifa', 1994, hlm. 378.

menjamin jika diantara salah satu anggota ada yang menunggak maka tunggakan tersebut akan ditanggung bersama. *Kedua*, orang yang dijamin, karena penanggungan tersebut berada dalam sebuah kelompok maka sudah di pastikan bahwa antara anggota dengan anggota yang lain sudah pada kenal satu dengan lainnya. Dan yang *ketiga* adalah adanya berkaitan dengan *Shighat (Ijab dan qabul)*. Disini *Shighat (Ijab qabul)* telah terdapat dalam surat pernyataan Tanggung Renteng yang mana telah ada kesepakatan oleh semua pihak anggota kelompok dan pihak Unit Pengelola Kegiatan. Yang *keempat* obyek penjaminan, dalam hal ini jelas nilainya karena penjaminan disini terkait dengan masalah hutang-piutang yang berkaitan dengan harta, yang mana sudah dapat difahami oleh semua anggota sebagai *kafiil* (pihak penjamin) dan *ashil* (pihak orang yang dijamin hutangnya).<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan bpk Muhammad Najib selaku pengasuh pondok *Ridhollah* dan bpk Kabul Turmudhi *pengurus MUI* , Kecamatan Kaloran pada hari, Kamis tanggal 20 Desember 2007

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya tentang pembahasan masalah yang menjadi kajian penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jasa atau bunga sebesar 1,5 % yang terdapat dalam transaksi hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, adalah tidak termasuk riba dan boleh menurut hukum, karena tidak adanya unsur eksploitasi dan pelipat gandaan dengan tempo waktu yang ditentukan dalam pembayaran sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130. Dalam pelaksanaannya dalam pemungutan bunga terdapat unsur *dharuri*, yang mana jasa atau bunga tersebut dialokasikan untuk penghapusan kredit yang macet, untuk digulirkan lagi bagi warga yang sudah mengajukan pinjaman yang belum mendapatkan pencairan dana pinjaman, dan selain itu juga digunakan untuk kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecamatan Kaloran yang tidak lain adalah sebagai nasabah UPK. Disamping itu dalam prakteknya pemungutannya pun tidak secara *dzulm* (aniaya dan penindasan).
2. Dalam perspektif hukum Islam *Tanggung Renteng* yang diterapkan oleh Unit Pengelola Kegiatan dalam istilah *fiqih* disebut dengan *dhaman* atau *kafalah*, yang mana dalam pelaksanaannya telah diperaktekkan oleh Unit

Pengelola Kegiatan, menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan Syara' karena telah memenuhi syarat dan rukun *kafalah* sebagaimana yang dijelaskan diatas.

Dengan menggunakan sistem *kafalah* secara kolektif atau *sistim Tanggung Renteng* yang ada dalam UPK yang diterapkan kepada kelompok peminjam (nasabah), menunjukkan realitas yang ada bahwa pada dasarnya dengan sistem tersebut, dimaksudkan untuk menghindari adanya kemacetan dan memperkuat adanya tanggung jawab bersama dalam kelompok peminjam.

## **B. SARAN-SARAN**

Beberapa saran yang dapat penulis berikan yang mungkin bisa bermanfaat untuk semua golongan baik nasabah maupun lembaga yang dalam hal ini adalah Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, yang diantaranya sebagai mana berikut:

1. Bagi *Muqridh* yang dalam hal ini adalah Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, dalam pelaksanaan hutang-piutang hendaknya tidak perlu mengadakan perjanjian yang nantinya akan memberatkan salah satu pihak.
2. Sebagai *muqridh* harus bisa berlapang dada dan memberikan kelonggaran untuk memberi kesempatan kepada *muqtaridh* yang mengalami kemacetan dalam angsuran.
3. Bagi masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung apabila tidak benar-benar merasa sangat membutuhkan dan

bila dikiranya tidak mampu untuk membayar hutang agar tidak mengajukan hutang karena nantinya akan membawa kesusahan.

### **C. PENUTUP**

Alhamdulillah dengan ridlo dan pertolongan Allah penulis mengucapkan Syukur kehadiran-Nya, karena dengan rahmat, hidayah serta Inayah-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik.

Dengan keterbatasan kemampuan dan keilmuan yang ada, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih membutuhkan saran dan kritik dari berbagai pihak.

Sebagai kata penutup penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah kemuliaan di bidang syari'ah dan memberikan kontribusi serta manfaat bagi kita semua Amiin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Malik. "*Tinjauan Hukum Islam Tentang kelebihan pembayaran Dalam Hutang piutang*", Risalah Sarjana Agama, Semarang; Perpustakaan Fak.Syari'ah IAIN, 1982.
- Abdul Mujib, *et al.* "*Kamus Istilah fiqh*", Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, Cet.2.1995.
- Afni, Kurniati "*Tinjauan sHukum Islam Terhadap Pinjaman dana P2KP*" (Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal", Semarang Fakultas Syari'ah IAIN W.S. Th. 2008
- al-Allamah, Syaikh M. *Rahmahal-Ummah fi Ikhtilaf al-A'imma*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, "Fiqh Empat Madzhab", HASYIM PRESS. Cet-1, 2001.
- al-bajuri, Syeh Ibnu khosim, "Al-bajuri ala ibnu khosim al-ghozi" Semarang, Thoha putra, Juz 11, tth.,
- Al-Dimyati, Sayid Bakri, *I'anaih Al-Thalibin*, Jus III, Al-Ma'arif, Bandung.
- Al-jaziri, Abdulrahman., Al-Fiqh Alal Madzahibil Arba'ah. Terj. Moh Zuhri, et al., "Fiqh Empat Madzhab", Jilid IV, Semarang; CV Asy Syifa'. 1994.
- Al-jaziri, "*Fiqh 'Ala madzabib al-Arba'ah*" Mesir: Attijariyatul Akbar.
- Al-Jurjani, At-Ta'rifat, Al-Haramain, Jeddah. t.th.
- Antonio, Muhammad Syafi'I "*Bank Syari'ah dari teori ke Praktek*" Jakarta, Gema Insani, cet. I, 2001
- Anwar, M., *Fiqh Islam*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1998.
- Baqii, Muhammad Fuwar Abdul, *Sunan Turmudzi*, Darul Fikri : Bairud. Juz III.
- Basyir, Ahmad Azhar, "*Hukum Islam Tentang Riba, Utang-piutang dan gadai*" Bandung : PT. Al-Ma'arif, cet-ke 2, 1983.
- Bisri, Moh. Adib, "*Risalah qawa-id fiqh*" terj. Al-Faraidul Bahiyyah, Menara Kudus, Kudus, 1977.
- \_\_\_\_\_. "*Terjemahan AL-FARAIIDUL BAHIIYYAH, Risalah Qawa-Id Fiqh*, Kudus, "MENARA KUDUS" th. 1977.,
- Bungin, Burhan "*Metodologi Penelitian kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan kebijakan publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*", Jakarta, Fajar Interpratama Offis, cet-2, 2006.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, Semarang : CV Toha Putra, 1989.

\_\_\_\_\_, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah, Al-Qur'an, Semarang : CV Toha Putra, 2002.

Departemen Dalam Negeri "*Petunjuk Tehnis Oprasiona Program Pengembangan Kecamatan*" Tim Koordinasi PPK , Jakarta, 2005.

\_\_\_\_\_ "*Tim koordinasi program pengembangan kecamatan*" Jakarta ,2005.

\_\_\_\_\_, "*Penjelasan I Sosialisasi PPK*" Jakarta. 2005.

\_\_\_\_\_, *Penjelasan X Pengelolaan dana bergulir*, Jakarta, Tim koordinasi pengembangan kecamatan, th. 2005.

Dewan Syari'ah Nasional MUI" *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*" Jakarta, CV. Gaung Persada, Cet-ke 3, th.2006..

Fahruddin, Fuad Mohd “ *Riba Dalam Bank, Koprasi, Perseroan dan Asuransi*” PT. Alma’arif, Bandung. Cet ke-1V.

Hadi, Abu Sura'i Abdul, *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat*. Yogyakarta : Yayasan Masjid Manarul Islam Bangil dan Pustaka LSI, Cet I, 1991.

Hatta, dalam Muhammad" *Manajemem Bank Syari'ah*" Yogyakarta, UPP, tth.

Ismail “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hilah Hukum Hutang-putang di Kec. Tanjung Kab. Brebes*” Semarang, Fakultas Syari’ah IAIN W.S. Th.1985

Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Kalam Mulia, Cet-I, 1995.

\_\_\_\_\_. "*Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*" Jakarta: Kalam Mulia, cet-1, 1995.

Malik, Abd. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Kelebihan Pembayaran dalam Utang-Piutang*” Semarang, Fakultas Syari’ah IAIN W.S. Th.1982

Mas'adi, Ghufroon A., *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Masyuri, Aziz, *Masalah Keagamaan Hasil Mu'tamar dan Munas Ulama' NU*, Surabaya : Dinamika press, 1997.

Munawwir Warson “*Kamus Al-Munawir*” Surabaya, Cet ke-4, th. 1997.



- Pasaribu, Chairuman. Suhrawardi K. Luhis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, Cet ke 1 1994.
- Perwataatmadja, Karnaen, "Keistiqomahan Dalam Mengelola Bank Syari'ah" Kertas Kerja Seminar Bank shyari'ah, Yogyakarta.
- Prawiranegara, Syafruddin, *Ekonomi dan keuangan makna ekonom islam*, Jakarta : CV.Haji masagung,1988.
- Pulunggono, Agung "*Buku Laporan Kolektif Fasilitator Kecamatan*" bulan Nopember 2007
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung : PT Sinar Baru Algensindo, Cet ke- 27 Edisi Revisi, 1994.
- \_\_\_\_\_, "*Fiqh Islam*," Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2002.
- Sabiq, Sayyid "*Fiqih Sunnah*" Bandung, PT. Alma'arif, jus.13, thn. 1988.
- \_\_\_\_\_, "*Fiqih Sunnah*","jus,12 . Terj. H. Kamaluddin,Pustaka Percetakan tth.,.
- Saeed, Abdullah "*Bank Islam dan Bunga*", Yogyakarta,Pustaka Pelajar, cet-2,2004.
- Sanhuri dalam Abdullah Saeed "*Bank Islam Dan Bunga*",Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-2, 2004.
- Shihab, Quraish "*Tafsir Al-Misbah*" Volume I, Jakarta: Laentera Hati, Cet.ke-V, 2005.
- Siangarimbun, Masri, Sofian Efendi ”Metode Penelitian Survai”Jakarta,LP3ES,cet-6,1985.
- Soekamto, Soerjono “ *PENGANTAR PENELITIAN HUKUM*”,Jakarta,Universitas Indonesia, Cet.,1942.
- Subagyo, P. Joko “*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*”Jakarta, PT. Rineka Cipta, cet-1, 1991.
- Suryabrata, Sumadi, “*Metodologi Penelitian*”, Jakarta, PT. Raja Grafindo, Cet. Ke-11, 1998.
- Syafei, Rachmat, " Fiqih Muamalah" Bandung, CV. Pustaka setia, Cet.3, 2006
- Taqiyuddin, Imam, "Khifayatul ahyar" Surabaya, Muhammad bin Ahmad bin nabhan wa'auladihi, juz 1. tth.,

Yazidal Qutni, Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, Darul Fiqri, 207-275 H.

Zuhri, Muh. dkk " *Terjemah Sunan Turmudzi*" Semarang, CV. Asy Syifa'. Jus, 2. Cet. I. thn. 1992.